



**KONSERVASI HUTAN MANGROVE
MELALUI EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2002-2012**

SKRIPSI

Oleh

BAGUS BAYU PRAYOGI

NIM 120110301038

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KONSERVASI HUTAN MANGROVE
MELALUI EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2002-2012**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

Oleh

BAGUS BAYU PRAYOGI

NIM 120110301038

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

MOTTO

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(Q.S Ar-Rum Ayat 41)

Barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya.

(HR. Tirmidzi)

Jika kita tidak bisa merawat bumi dan isinya, setidaknya kita tidak boleh merusaknya

(Bagus Bayu Prayogi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Bayu Prayogi

NIM : 120110301038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 November 2019

Yang menyatakan,

Bagus Bayu Prayogi

NIM. 120110301038

PERSETUJUAN

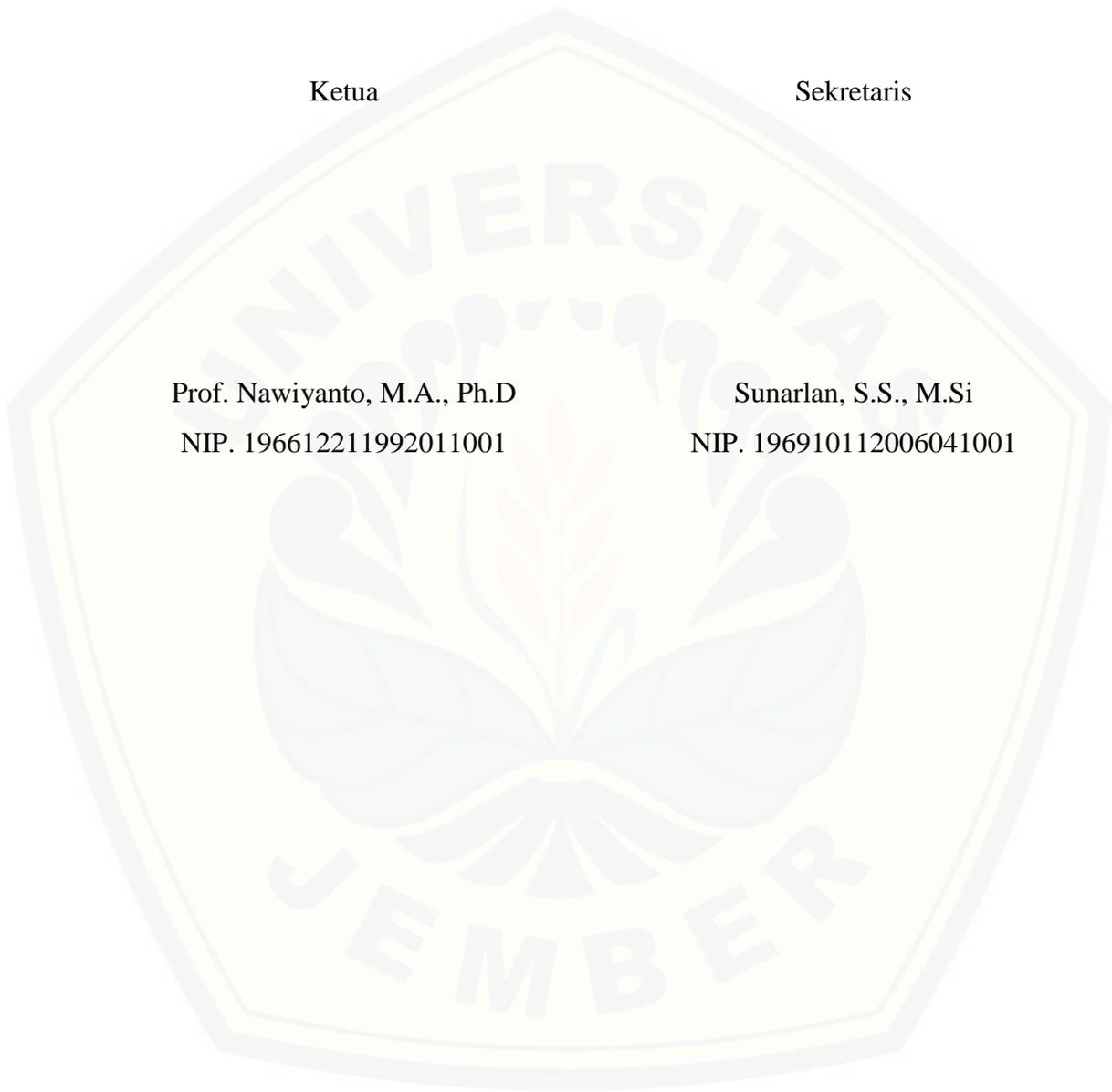
Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Ketua

Sekretaris

Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D
NIP. 196612211992011001

Sunarlan, S.S., M.Si
NIP. 196910112006041001



PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012” telah diuji dan disahkan oleh Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, pada :

Hari, Tanggal : Jumat, 8 November 2019

Tempat : Jember

Tim Penguji

Ketua

Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D
NIP. 196612211992011001

Sekretaris

Sunarlan, S.S., M.Si
NIP. 196910112006041001

Anggota I,

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum
NIP. 197108251999031001

Anggota II,

Dr. Tri Chandra Aprianto, S.S., M.Hum
NIP. 197304262003121001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum.

NIP. 196805161992011001

PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Misti Sriyulianti yang telah memberikan cinta, kasih sayang kepada penulis, sosok tangguh penuh kesabaran yang merawat serta mendidik sedari lahir hingga kini. Engkau adalah sosok yang sangat berharga sepanjang hidup,
2. Ayahanda tercinta Heri Harjo yang telah memberikan kasih sayang, mendidik serta memberikan motivasi tiada henti, ajaran dan bimbingannya yang senantiasa mendorong penulis untuk bekerja keras menjadi lebih baik lagi,
3. Adikku tercinta Renaldy Mahardika yang sedang berjuang menempuh pendidikan Pelayaran, Keluarga Besar Bani Hafid, Keluarga Besar Bani Rohan, yang menaruh harapan besar bagi penulis,
4. Kiki Rizki Amalia, partner yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan karya ini, juga Koko yang selalu setia menemani dan menghibur penulis,
5. Crew Bolangers Banyuwangi dan Kolega,
6. Keluarga Besar The Preanger,
7. Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa Sumberasri,
8. Almamater Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tercinta,
9. Badan Keluarga Mahasiswa Sejarah

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang upaya konservasi hutan mangrove, kerjasama antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Desa Sumberasri melalui pengembangan ekowisata Bedul guna melestarikan serta memberikan dampak baik terhadap masyarakat dengan Judul “Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012”. Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum.; Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember,
2. Prof. Dr. Nawiyanto, M.A., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, sekaligus Dosen Pembimbing Satu, yang telah mengarahkan dengan cermat dan meluangkan waktu, pikiran, serta perhatiannya dalam penulisan skripsi ini,
3. Sunarlan S.S., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Dua, yang telah memberikan saran, masukan serta pengarahan dengan sabar dan cermat,
4. Dr. Eko Crys Endrayadi, S.S., M.Hum., dan Dr. Tri Chandra Aprianto, S.S., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Dr. Sri Ana Handayani, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian sejak mahasiswa baru sampai dengan penulis menyelesaikan karya tulis ini.
6. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., dan Drs. IG Krisnadi, M.Hum., selaku Dosen Sejarah, terimakasih atas motivasi dan pengalaman penelitian yang menyenangkan,
7. Bapak Ibu Guru mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman kepada penulis,

8. Ayahanda Heri Harjo dan Ibunda Misti Sriyulianti, yang tidak pernah berhenti mendo'akan, mendukung serta memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini,
9. Teman-teman Sejarah Angkatan 2012 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, KKN Kelompok 55 Desa Mayangan Gumukmas, Rumah Eyang Perum Sumber Alam Blok A.9,
10. Sahabat karib, Fery Anggara dan Sari yang sering bertukar pikiran dengan penulis, Baihaki, Reza, Aga, Yasin, Endar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal,
11. Balai Taman Nasional Alas Purwo, para staf dan karyawan yang telah memberikan beberapa referensi buku-buku dan informasi mengenai penulisan skripsi ini,
12. Drs. Suyatno, Sukadiyanto, Eko Kurniawan, Nur Afandi, Pemerintah Desa Sumberasri, BUMDES Loh Jinawe serta BPEMBB, yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis,
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan berdiskusi, memberikan data sehingga sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini,
Semoga atas bantuan, pengarahan, dukungan dan bimbingannya, mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Guna kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 8 November 2019

Bagus Bayu Prayogi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
RINGKASAN	xx
SUMMARY	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Manfaat	14
1.4 Ruang Lingkup	15
1.5 Tinjauan Pustaka	17
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	21
1.7 Metode Penelitian	24
1.8 Sistematika Penulisan	27

BAB 2 KONDISI HUTAN MANGROVE DI BLOK BEDUL DESA SUMBERASRI	29
2.1 Kawasan Penyangga Taman Nasional	29
2.2 Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Mangrove oleh Masyarakat Sekitar Taman Nasional	43
2.3 Kerusakan Hutan Mangrove di Blok Bedul	50
BAB 3 UPAYA KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI BLOK BEDUL DESA SUMBERASRI	57
3.1 Kesadaran Masyarakat Desa Sumberasri tentang Kelestarian Hutan Mangrove	57
3.2 Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul	67
3.3 Pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul	72
3.4 Dampak Konservasi Hutan Mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul	87
3.4.1 Dampak Sosial	87
3.4.2 Dampak Ekonomi	91
3.4.3 Dampak Lingkungan	95
BAB 4 KESIMPULAN	99
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	108

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	:	Association of Southeast Asian Nations
BAKOSURTANAL	:	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BAPI	:	Biodiversity Action Plan Indonesia
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPEMBB	:	Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul
BUMDES	:	Badan Usaha Milik Desa
FAO	:	Food and Agriculture Organization
IBSAP	:	Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan
IUCN	:	International Union for Conservation and Nature
JICA	:	Japan International Cooperation Agency
KPA	:	Kawasan Pelestarian Alam
KPH	:	Kesatuan Pemangku Hutan
KSA	:	Kawasan Suaka Alam
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	:	Mandi Cuci Kakus
MDK	:	Model Desa Konservasi
Mdpl	:	Meter di atas permukaan laut
MoU	:	Memorandum of Understanding
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
RPJMN	:	Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional
SDA	:	Sumber Daya Alam
SK	:	Surat Keterangan
SPTN	:	Seksi Pengeloaan Taman Nasional
TIES	:	The International Ecotourism Society
TNAP	:	Taman Nasional Alas Purwo
UNDP	:	United Nations Development Programme
UU	:	Undang Undang
WCU	:	World Conservation Union

DAFTAR ISTILAH

- Animo : Hasrat dan keinginan yang kuat untuk berbuat melakukan, atau mengikuti sesuatu.
- Atraksi : Wisata seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang merupakan daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata.
- Biodiversity : Keanekaragaman hayati; pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan, yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya.
- Deforestasi : Penebangan hutan
- Degradasi : Kemunduran, kemerosotan, penurunan dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat dan sebagainya).
- Ekologis : Bersifat ekologi, yakni hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya.
- Ekosistem : Keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.
- Ekowisata : Perjalanan wisata yang dilakukan ke dalam area yang masih alami dengan tujuan mengkonservasi, melestarikan dan juga menyejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan wilayah tersebut.
- Eksplorasi : Pengusahaan, pendayagunaan.
- Fauna : Keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat.
- Flora : Keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan.
- Gondang-gandung : Perahu tradisional yang telah dimodifikasi untuk angkutan.

Habitat	:	Tempat hidup organisme tertentu; tempat hidup yang alami (bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan); lingkungan kehidupan asli
Home Stay	:	Bentuk pariwisata yang memungkinkan pengunjung untuk menyewa kamar dari keluarga lokal.
Ilegal	:	Tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah.
Komoditas	:	Barang dagangan utama; benda niaga.
Konservasi	:	Pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan pelestarian.
Objek Wisata	:	Sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang menjadi daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut.
Reformasi	:	Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Rehabilitasi	:	Perubahan kepada kedudukan atau keadaan seperti semula.
Stakeholder	:	Pihak terkait yang memiliki kepentingan.
Topografi	:	Kajian atau penguraian yang terperinci tentang keadaan muka bumi pada suatu daerah.
Wisata	:	Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
Wisawatan	:	Orang yang melakukan kegiatan wisata.
Zonasi	:	Pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012.	40
Tabel 2.2	Penduduk Desa Sumberasri yang Bekerja Menurut Pekerjaan Umum dan Sektor Tahun 2012.	41
Tabel 2.3	Dinamika Luasan tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Tahun 1989, 1995, 1997, 2004 dan 2006.	54
Tabel 3.1	Pemberdayaan Masyarakat.	73
Tabel 3.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana.	77
Tabel 3.3	Promosi dan Kerjasama.	79
Tabel 3.4	Agenda Kegiatan BPEMBB Tahun 2009-2011.	80
Tabel 3.5	Daftar Paket Ekowisata.	84
Tabel 3.6	Pengelolaan Sumber Daya Alam.	97

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Foto dan Bagan	Halaman
Gambar 2.1	Peta Zonasi Taman Nasional Alas Purwo.	33
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kerja Taman Nasional Alas Purwo.	35
Gambar 2.3	Peta Desa Penyangga Taman Nasional Alas Purwo.	38
Gambar 2.4	Peta Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi	40
Gambar 2.5	Peta Tingkat Kerawanan Aktivitas Masyarakat Taman Nasional Alas Purwo.	45
Gambar 2.6	Citra Satelit Landsat Ekosistem Mangrove di Segara Anakan Resort Grajagan Taman Nasional Alas Purwo.	53
Gambar 3.1	Foto Hutan Jati Milik Perhutani yang sebagian telah Gundul.	64
Gambar 3.2	Peta Desa Model Konservasi.	66
Gambar 3.3	Struktur Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul Tahun 2008.	70
Gambar 3.4	Perahu Gondang-gandung.	74
Gambar 3.5	Struktur Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul Tahun 2009.	75
Gambar 3.6	Peta Arah Pengembangan Ekowisata Blok Bedul.	80
Gambar 3.7	Studi Banding ke Mangrove Information Centre di Bali.	81
Gambar 3.8	Peta Sebaran Atraksi Ekowisata Mangrove Blok Bedul.	84

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Surat Lembaga Penelitian Universitas Jember	108
Lampiran B	Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (<i>SIMAKSI</i>)	109
Lampiran C	MoU Desa Sumberasri dengan BTNAP	110
Lampiran D	Surat Keputusan Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul (BPEMBB)	117
Lampiran E	Berita Acara Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul	119
Lampiran F	Koran Radar Banyuwangi	121
Lampiran G	Dokumentasi Foto	124
Lampiran H	Surat Keterangan dan Hasil Wawancara	132

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi konservasi mangrove? (2) Bagaimana upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Alas Purwo? (3) Apa dampak konservasi hutan mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul? Teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial dengan pendekatan sosiologi lingkungan, dan metode yang digunakan adalah metode sejarah. Konservasi merupakan kegiatan pelestarian dan perlindungan. Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata alam yang bertujuan dalam upaya konservasi. Ekowisata mangrove blok Bedul dibangun dan dikelola sebagai objek wisata alam terbatas sebagai upaya konservasi kawasan hutan mangrove Taman Nasional Alas Purwo. Pengelolaan ekowisata mangrove blok Bedul merupakan kerjasama antara Desa Sumberasri, Taman Nasional Alas Purwo serta JICA. Ekowisata mangrove blok Bedul merupakan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat Desa Sumberasri melalui Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaannya ditujukan untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan. Masyarakat diberdayakan sebagai upaya menghentikan ketergantungan mereka yang bersifat merusak menjadi melestarikan sumber daya alam yang ada. Kolaborasi antara *stakeholder* terkait dalam wujud pengelolaan ekowisata mangrove menjadi upaya konservasi kawasan hutan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo. Kelestarian kawasan hutan mangrove dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan, terutama masyarakat pesisir.

Kata kunci: konservasi, ekowisata, mangrove, Banyuwangi.

ABSTRACT

This study discusses the conservation of mangrove forests through the mangrove ecotourism of Bedul Block, Sumberasri Village, Purwoharjo District, Banyuwangi Regency, 2002-2012. The research problems in this study are (1) What factors were behind the mangrove conservation? (2) What was the effort to preserve the mangrove forest ecosystem in the Alas Purwo National Park area? (3) What were the impacts of mangrove forest conservation through the Bedul Block Mangrove Ecotourism? The theory used here is social movement theory with an environmental sociology approach, and the method used is a historical method. Conservation is a preservation and protection activity. Ecotourism is a nature tourism activity that aims in conservation efforts. Bedul Block Mangrove Ecotourism was built and managed as a limited natural tourist attraction as an effort to conserve the mangrove forest area of the Alas Purwo National Park. The management of the Bedul Block Mangrove Ecotourism is a collaboration between Sumberasri Village, Alas Purwo National Park and JICA. Bedul Block Mangrove Ecotourism is a tourist attraction managed by Sumberasri Village community through the Bedul Block Mangrove Ecotourism Management Agency. Community empowerment in its development and management is aimed at shifting the habits of the people who were previously dependent on forest products. The community was empowered as an effort to stop their destructive dependence to preserve the existing natural resources. Collaboration between relevant stakeholders in the form of mangrove ecotourism management has become an effort to conserve mangrove forests in Alas Purwo National Park. The preservation of mangrove forest areas can provide great benefits for the welfare of communities around the area, especially coastal communities.

Keywords: conservation, ecotourism, mangroves, Banyuwangi.

RINGKASAN

Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012, Bagus Bayu Prayogi, 120110301038; 2012; Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Konservasi secara harfiah berarti pelestarian dan perlindungan. Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke kawasan alami dalam rangka upaya konservasi suatu kawasan tersebut. Pemanfaatan kawasan konservasi sebagai destinasi wisata alam mendukung upaya pelestarian dan perlindungan serta memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Ekowisata Mangrove Blok Bedul mampu mengangkat nama Desa Sumberasri, mengalihkan ketergantungan masyarakat sekitar pada hasil hutan dengan terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat dalam membuka usaha serta ikut serta dalam pengelolaan ekowisata. Upaya konservasi kawasan hutan mangrove berjalan seiring pengelolaan ekowisata. Paket ekowisata yang ditawarkan di dalamnya memiliki peran penting dalam upaya konservasi hutan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui faktor-faktor yang mendasari upaya konservasi hutan mangrove di Blok Bedul, sebelum adanya ekowisata; (2) menjelaskan proses lahirnya Ekowisata Mangrove Blok Bedul sebagai upaya konservasi hutan mangrove; (3) menjelaskan dampak Ekowisata Mangrove Blok Bedul terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan di Desa Sumberasri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penulisan berikutnya yang berkaitan dengan konservasi hutan mangrove dan ekowisata, serta memberi pemahaman pada pembaca terkait pengaruh pengelolaan ekowisata terhadap upaya konservasi kawasan taman nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengembangan ekowisata di Desa Sumberasri berperan dalam upaya konservasi kawasan taman nasional. Kerusakan kawasan hutan akibat penjarahan dan pencurian kayu pada tahun 90an hingga

pasca reformasi disebabkan ketergantungan akan hasil hutan yang tinggi. Ketergantungan masyarakat pada hasil sumber daya hutan dipicu akibat rendahnya pemahaman masyarakat setempat akan kelestarian alam. Kebutuhan ekonomi masyarakat yang tinggi menyebabkan pemanfaatan kawasan hutan menjadi semena-mena. Pengembangan dan pengelolaan ekowisata telah digagas sejak tahun 2002.

Keseriusan pemerintah Desa Sumberasri dalam mengangkat nama desa dengan memanfaatkan potensi desa mulai dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya. Penunjukan Model Desa Konservasi pada tahun 2006 menjadi proses awal pengelolaan ekowisata. Kerjasama antara Desa Sumberasri dengan Taman Nasional Alas Purwo resmi terjalin tahun 2007. Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) merupakan lembaga yang mempercepat pengembangan ekowisata mangrove Blok Bedul. Pengelolaan kawasan Bedul menjadi ekowisata merupakan upaya konservasi hutan mangrove di kawasan Blok Bedul dan taman nasional. Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul terbentuk pada tahun 2008 sebagai perwujudan keseriusan Pemerintah Desa Sumberasri dalam mengelola kawasan Blok Bedul menjadi ekowisata. Dengan tema besar ekowisata, pengelolaan kawasan Bedul menjadi terarah sesuai kaidah konservasi.

Pengelolaannya melibatkan masyarakat setempat yang dulu memiliki ketergantungan pada hasil hutan. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan diharapkan menjadi bekal pelestarian kedepannya. Masyarakat setempat yang sangat bergantung pada sumber daya alam yang dulunya bersifat merusak, menjadi mengelola dan melestarikan. Pada tahun 2009 atas musyawarah dengan pihak taman nasional, Ekowisata Mangrove Blok Bedul dibuka untuk umum untuk pertama kalinya. Dalam Anugerah Wisata Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009, Bedul menjadi perwakilan dari Banyuwangi dan meraih The Best Commitment Ecotourism dalam kategori pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Ekowisata Mangrove Blok Bedul secara resmi dibuka pada tanggal 10 Oktober 2010 oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari. Pada tahun 2012 kerjasama Pemerintah Desa Sumberasri dengan Taman Nasional Alas Purwo berakhir. Status pengelolaan kawasan Blok Bedul berubah

menjadi ijin usaha penyedia jasa wisata alam, dalam hal tersebut ekowisata. Upaya konservasi kawasan hutan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo berjalan seiring kegiatan pariwisata yang berlangsung. Adanya Ekowisata Mangrove Blok Bedul secara bertahap mengurangi intensitas masyarakat sekitar kawasan yang keluar masuk hutan.

Rehabilitasi kawasan hutan mangrove juga berlangsung melalui beberapa paket ekowisata yang mendukung upaya konservasi hutan mangrove seperti pembibitan pohon mangrove serta penanaman mangrove. Ekowisata Mangrove Blok Bedul memberikan dampak besar bagi kehidupan ekologis kawasan taman nasional serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sumberasri. Ekowisata merupakan hal baru dalam sejarah pengembangan pariwisata alam di Kabupaten Banyuwangi, namun adanya pengembangan ekowisata ini mampu mengalihkan atau merubah kebiasaan bergantung pada sumber daya hutan. Ekowisata Mangrove Blok Bedul menjadi contoh pengelolaan wisata berbasis masyarakat berkelanjutan yang pada tahun-tahun berikutnya gencar di kembangkan di seluruh wilayah Banyuwangi.

SUMMARY

Mangrove Forest Conservation through the Mangrove Ecotourism in Bedul Block, Sumberasri Village, Purwoharjo District, Banyuwangi Regency, 2002-2012, Bagus Bayu Prayogi, 120110301038; 2012; History Department, Faculty of Cultural Sciences, Jember University.

Conservation literally means preservation and protection. Ecotourism is a tourist trip to a natural area within the framework of an area's conservation efforts. Utilization of the conservation area as a natural tourism destination supports conservation and protection efforts and provides benefits for the welfare of the community around the area. Ecotourism can be seen as a concept of developing sustainable tourism which aims to support environmental conservation efforts and increase community participation in its management. Bedul Block Mangrove Ecotourism is able to raise the name of Sumberasri Village, diverting the dependency of surrounding communities on forest products by opening up new jobs for local communities to open businesses and participate in ecotourism management. Mangrove forest conservation efforts go hand in hand with ecotourism management. The ecotourism package offered in it has an important role in efforts to conserve mangrove forests in Alas Purwo National Park.

The objectives of this study are (1) to know the factors that underlie the efforts to conserve mangrove forests in Bedul Block, prior to ecotourism; (2) to describe the process of the birth of the Bedul Block Mangrove Ecotourism as an effort to conserve mangrove forests; (3) to explain the impact of the Bedul Block Mangrove Ecotourism on social, economic and environmental life in Sumberasri Village. This research is expected to be a reference for the next writing related to the conservation of mangrove forests and ecotourism, as well as providing readers with an understanding of the influence of ecotourism management on the conservation of national park areas.

The results showed that the development of ecotourism in Sumberasri Village played a role in the conservation of the national park area. Damage to the forest area due to looting and timber theft in the 90s to post-reform was caused by a high dependence on forest products. Community dependence on forest resource products was triggered due to the low understanding of the local community about

nature conservation. The high economic needs of the community led to arbitrary exploitation of the forest area. The development and management of ecotourism has been initiated since 2002.

The seriousness of the Sumberasri village government in raising the village's name by utilizing the village's potential began to be carried out by involving the community in the development process. The appointment of the Conservation Village Model in 2006 became the initial process of ecotourism management. The collaboration between Sumberasri Village and Alas Purwo National Park was officially established in 2007. The Japan International Cooperation Agency (JICA) is an institution that accelerates the development of the Bedul Block mangrove ecotourism. The management of the Bedul area into ecotourism is an effort to conserve mangrove forests in the Bedul Block area and national parks. The Bedul Block Mangrove Ecotourism Management Agency was formed in 2008 as a manifestation of the seriousness of the Sumberasri Village Government in managing the Bedul Block area into ecotourism. With the big theme of ecotourism, the management of the Bedul area is directed according to the rules of conservation.

Management involves local communities who used to have a dependency on forest products. The effort to involve the community in management was expected to be a provision for future conservation. Local people who are very dependent on natural resources that were once destructive, are managing and preserving. In 2009, in consultation with the national parks, the Bedul Block Mangrove Ecotourism was opened to the public for the first time. In the 2009 East Java Provincial Tourism Award, Bedul became a representative of Banyuwangi and won The Best Commitment Ecotourism in the category of community-based tourism management. Bedul Block Mangrove Ecotourism was officially opened on October 10, 2010 by Banyuwangi Regent Ratna Ani Lestari. In 2012 the collaboration between Sumberasri Village Government and Alas Purwo National Park ended. The status of the management of the Bedul Block area has changed to a business permit that provides nature tourism services, in this case ecotourism. Efforts to conserve mangrove forests in Alas Purwo National Park go hand in hand with ongoing tourism activities. The existence of the Bedul Block Mangrove

Ecotourism has gradually reduced the intensity of the community living in and out of the forest.

Rehabilitation of the mangrove forest area also took place through several ecotourism packages that supported mangrove forest conservation efforts such as mangrove tree nurseries and mangrove planting. Bedul Block Mangrove Ecotourism had brought a great impact on the ecological life of the national park area and the socio-economic life of the Sumberasri village community. Ecotourism is a new thing in the history of the development of natural tourism in Banyuwangi, but the development of ecotourism was able to divert or change the habit of depending on forest resources. Bedul Block Mangrove Ecotourism is an example of sustainable community-based tourism management which in the following years is aggressively developed throughout the Banyuwangi region.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan yang memiliki garis pantai hampir sepanjang 81.000 kilometer.¹ Wilayah pesisir Indonesia merupakan kawasan penting sebagai jalur perdagangan internasional. Selain itu, wilayah pesisir Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang beragam. Wilayah pesisir memiliki keunikan karena ekosistemnya merupakan perpaduan antara kehidupan darat dan air. Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.²

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pantai selain ekosistem terumbu karang (*coral reef*) dan padang lamun (*seagrass beds*). Tiga

¹ Anugerah Nontji, *Laut Nusantara* (Jakarta: Djambatan, 1987), hlm. 4.

² M. Gufron H. Kordi K, *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 8.

ekosistem ini sangat berperan penting sebagai benteng alami pelindung pantai.³ Terumbu karang melindungi dari terpaan gelombang dan mengurangi energi gelombang yang menghantam pantai. Ekosistem padang lamun berada di tengah-tengah antara ekosistem terumbu karang dan mangrove, memiliki fungsi sebagai peredam arus dan gelombang yang kuat. Sementara ekosistem mangrove menyediakan hutan pantai yang sangat kokoh sebagai benteng pertahanan alami.

Mangrove atau bakau merupakan tumbuhan pantai yang hidup di perairan rawa atau hamparan lumpur yang terbatas oleh pasang surut air laut. Menurut Macnae, sebagaimana dikutip dalam Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk, asal istilah mangrove merupakan perpaduan antara bahasa Portugis *mangue* dan bahasa Inggris *grove*. Perpaduan dua bahasa ini menjadi mangrove yakni semak belukar yang tumbuh di tepi laut.⁴ Secara spesifik mangrove merupakan komunitas tanaman perairan payau yang tersusun oleh banyak genus dan spesies tumbuhan lain. Istilah mangrove sering digunakan selain hutan bakau atau hutan payau.

Ekosistem mangrove berdasarkan jenis pohonnya, yaitu didominasi oleh bakau (*Rhizophora*), maka kawasan mangrove juga disebut sebagai hutan bakau.⁵ Habitat mangrove berada di perairan payau, yakni perairan pertemuan antara air laut dan air tawar yang bersifat payau atau memiliki kadar garam, namun tidak sebanyak kadar garam yang terkandung dalam perairan laut. Mangrove merupakan salah satu hutan alamiah yang unik dan mempunyai nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi.

Secara ekologis, hutan mangrove memiliki fungsi yang sangat kompleks, antara lain sebagai penyeimbang ekosistem, peredam gelombang laut dan angin badai, pelindung pantai dari proses abrasi dan erosi, penahan lumpur dan penjerat sedimen, sumber unsur hara, sebagai tempat berlindung, mencari makan, dan

³ Amran Saru, *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 2.

⁴ Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk., *Ekosistem Pesisir an Laut Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 77.

⁵ M. Gufron H. Kordi K, *op.cit.*, hlm. 9.

pemijahan berbagai spesies biota perairan payau. Secara ekonomis, ekosistem mangrove dapat dijadikan sebagai areal budi daya, penangkapan, objek wisata, dan sumber kayu bagi masyarakat. Di samping itu, ekosistem hutan mangrove juga sebagai habitat berbagai satwa liar, terutama spesies burung dan mamalia, sehingga kelestarian hutan mangrove berperan dalam melestarikan berbagai satwa liar tersebut.⁶

Selain memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi, hutan mangrove memiliki nilai sosiologis bagi masyarakat kawasan pesisir. Secara sosiologis hutan mangrove dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dengan hasil sumber dayanya yang beragam. Sumber daya yang dihasilkan mangrove dapat dimanfaatkan secara langsung maupun melalui pengolahan. Produk olahan dari mangrove diketahui sangat beragam, baik berasal dari daun, batang pohon, akar, serta bunga mangrove. Tercatat sekitar puluhan macam produk olahan yang dihasilkan oleh mangrove dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya, untuk bahan bakar (kayu bakar, arang, alkohol); bahan bangunan (tiang-tiang, papan pagar); alat penangkapan ikan (tiang sero, bubu, pelampung, tanin untuk penyamak); tekstil dan kulit (rayon, bahan untuk pakaian, tannin untuk menyamak kulit); makanan, minuman dan obat-obatan (gula, alkohol, minyak sayur, cuka); peralatan rumah tangga (mebel, lem); pertanian (pupuk hijau); dan chips untuk pabrik kertas.⁷

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan memiliki kekayaan hayati yang paling banyak. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 4,25 juta hektar atau 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia. Sebagian besar mangrove berada di pesisir Sumatra, Kalimantan, Jawa dan Papua. Menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*) luas hutan mangrove di Indonesia pada 2005 hanya mencapai 3.063.300 hektar. Luas kawasan mangrove yang disampaikan FAO tersebut merupakan 19% dari luas hutan mangrove dunia, melebihi luas hutan mangrove Australia yang hanya 10% dan Brasil justru 7%

⁶ Indriyanto, *Ekologi Hutan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 68.

⁷ Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk., *op.cit.*, hlm. 111.

saja.⁸ Sementara itu, Kementerian Kehutanan pada 2007, melalui Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan juga mengeluarkan data hutan mangrove Indonesia, luasnya mencapai 7.758.410,595 hektar, tetapi hampir 70% di antaranya mengalami kerusakan.⁹

Kerusakan kawasan hutan mangrove disebabkan oleh berbagai faktor. Kerusakan secara alami terjadi karena peristiwa alam seperti adanya angin topan atau badai dan iklim kering berkepanjangan, sedangkan kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia disebabkan oleh aktivitas manusia disekitar kawasan hutan mangrove yang berakibat pada perubahan karakteristik fisik maupun kimiawi di sekitar habitat mangrove.¹⁰

Hutan mangrove, sebagai salah satu sumber daya alam tidak terlepas dari dilema tersebut. Penggunaan hutan mangrove untuk lahan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambakan, eksploitasi hasil hutan dan konversi menjadi permukiman terjadi hampir di seluruh bagian hutan mangrove Indonesia. Sebagian dari pemanfaatan lahan tersebut tidak bijaksana sehingga menimbulkan kerusakan. Bila kondisi tersebut dibiarkan, tentu akan mengakibatkan kerusakan yang semakin parah, rusaknya ekosistem dan musnahnya keanekaragaman hayati yang ada didalam dan yang bergantung pada hutan mangrove.

Pembangunan di Indonesia selama ini mengabaikan faktor bencana alam dan kelestarian lingkungan. Semua potensi dan sumber daya alam yang berguna mencegah dan mengurangi dampak bencana dibabat semena-mena. Hutan mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang mengalami kerusakan akibat dari pembangunan tersebut. Perubahan kawasan hutan mangrove berakibat pada berubahnya karakteristik fisik dan kimiawi di sekitar habitat mangrove. Dampak dari kerusakan itu adalah abrasi pantai yang mengancam permukiman masyarakat, intrusi air laut lebih jauh ke daratan yang menyebabkan bertambah

⁸ Robert Siburian dan John Haba (ed), *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 5.

⁹ Ahmad Muhtadi Rangkuti dkk., *op.cit.*, hlm. 119-120.

¹⁰ M. Gufron H. Kordi K, *op.cit.*, hlm. 5.

sulitnya mendapatkan air bersih, serta dampak yang tidak disadari yakni hilangnya benteng alami penahan gelombang air laut. Bencana tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004 merupakan salah satu bencana terburuk yang melanda wilayah pesisir di Indonesia. Kerusakan akibat bencana tsunami ini seharusnya dapat diminimalisir jika ekosistem mangrove terjaga kelestariannya, mengingat fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat besar bagi wilayah pesisir pantai.

Jika kita melihat sepintas, hutan mangrove Indonesia yang luasnya kecil jika dibandingkan seluruh hutan Indonesia, tidaklah begitu menonjol perannya dalam kehidupan bangsa kita. Namun bila ditelaah lebih dalam akan terungkap rahasia berupa adanya mekanisme hubungan antara bagian-bagian dalam ekosistem mangrove, sehingga perannya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Timbulnya kesadaran dan pengertian akan peranan mangrove tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tidak berharga, tetapi merupakan sumber daya yang bermanfaat yang perlu dijaga kelestariannya.

Kesadaran pentingnya menjaga kelestarian mangrove tidak saja datang dari kalangan ilmuwan yang kini makin banyak menjadikan mangrove sebagai objek penelitian, tetapi juga di kalangan masyarakat umum dan para pengambil keputusan. Hal ini terlihat dari besarnya perhatian Indonesia dan dunia dengan berdirinya badan-badan pendukung pelestarian hutan mangrove, seperti terbentuknya International Society for Mangrove Ecosystems (ISME) yang berkedudukan di Okinawa, Jepang, Yayasan Mangrove Indonesia (YMI) serta disusunnya “Strategi Nasional untuk Pengelolaan Hutan Mangrove di Indonesia” yang hampir mendekati penyelesaiannya.¹¹

Kerusakan kawasan hutan mangrove menjadi isu lingkungan yang sedang hangat diperbincangkan kalangan pemerhati lingkungan. Kelompok-kelompok pemerhati lingkungan gencar melakukan kampanye guna menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan di berbagai penjuru dunia. Kelestarian hutan mangrove juga menjadi topik bahasan, selain pemanasan global.

¹¹ Nursidah, “Hutan Mangrove Kita” dalam *Majalah Kehutanan Indonesia*, Edisi ke-5 Tahun 1996/1997., hlm. 33.

Konservasi agaknya menjadi solusi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam serta lingkungan.

Konservasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yakni *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Menurut *International Union for Conservation for Nature* (IUCN) pada 1994 menetapkan batasan pengertian kawasan dilindungi, yakni sebuah wilayah daratan dan/atau perairan yang ditetapkan untuk perlindungan dan pengawetan keragaman hayati dan sumber daya alam serta budaya yang terkait, serta dikelola secara legal dan efektif.¹² Di Indonesia istilah kawasan dilindungi sering dikenal sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan peruntukannya. Peraturan perundangan tentang kawasan konservasi di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengertian kawasan konservasi dalam undang-undang tersebut meliputi kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).¹³

KSA meliputi cagar alam dan suaka margasatwa. Kedua jenis kawasan ini mempunyai manfaat yang sama, yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan serta kegiatan yang menunjang budi daya, sedangkan pada kawasan suaka margasatwa ditambahkan satu manfaat lagi, yaitu untuk wisata alam terbatas. KPA terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, dan taman buru. Pada kawasan ini selain fungsi konservasi, juga berfungsi untuk pemanfaatan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan atau lestari.¹⁴

Taman nasional menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah kawasan

¹² Hermawan, M.T. Tri., dkk. *Pengelolaan Kawasan Konservasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 4.

¹³ SK Presiden Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990.

¹⁴ *Ibid.*

pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.¹⁵

Ekowisata merupakan upaya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan konservasi sebagai destinasi pariwisata alam yang mendukung upaya pelestarian dan perlindungan serta memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah alami dalam rangka mengkonservasi atau menyelamatkan lingkungan dan memberi penghidupan penduduk lokal.¹⁶ Menurut *World Conservation Union* (WCU), ekowisata adalah perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal.

Kus Hadinoto, seorang konsultan pariwisata Indonesia, dalam Seminar Pengelolaan Pariwisata di Ciawi, membedakan antara *nature-related tourism* dan *nature-based tourism*. Menurutnya, aktivitas dari kedua jenis pariwisata itu dilakukan di alam terbuka. Bedanya, dalam *nature-related tourism*, alam bukan merupakan unsur atau elemen-elemen utama, contohnya adalah olah raga golf. Lain halnya *nature-based tourism* dimana elemen-elemen alam merupakan unsur utama sehingga tidak boleh dicemari, apalagi dirusak.¹⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan apa yang disebut ekowisata atau pariwisata eko adalah *nature-based tourism* yakni sebagai kegiatan wisata di kawasan lingkungan alam yang dilindungi.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Iwan Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 15.

¹⁷ H. Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 118-119.

Ekowisata dapat dilihat sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Industri ekowisata berkembang sebagai respon terhadap meningkatnya isu-isu lingkungan. Menurut Wood, sebagaimana dikutip dari Iwan Nugroho, mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.¹⁸ Jenis wisata ini dipromosikan dengan tujuan jangka panjang untuk ikut mendorong konservasi lingkungan dan sumber daya alam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Meskipun ekowisata telah terdefinisi dengan jelas, namun dalam operasionalnya masih terjadi kekeliruan, sehingga, sangat sulit untuk membedakannya dengan wisata alam lainnya. Ini merupakan akibat dari lemahnya pemahaman pelaku wisata tentang visi dan misi ekowisata yang dimaksudkan. Berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan wisata seringkali mempunyai korelasi dengan pembangunan kawasan. Keseimbangan antara wisata dan pembangunan sektor ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kepuasan antara wisatawan dan masyarakat lokal merupakan pokok pikiran dalam menginterpretasikan wisata berkelanjutan.

Di masa mendatang agaknya riset-riset tentang pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya alam, dan peran wisata didalamnya harus ditingkatkan. Tujuannya yakni untuk mencari konsep dan model yang sesuai bagi pencapaian masyarakat berkelanjutan, dengan memanfaatkan sektor wisata sebagai salah satu penggerak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang pengelolaan pengembangan ekowisata untuk mendukung pelestarian lingkungan.

Konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi (*protected area*). Adanya jasa ekowisata

¹⁸ Iwan Nugroho, *op.cit.*, hlm. 16.

¹⁹ Maksud utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan populasi manusia saat ini dalam sebuah pembangunan, tanpa harus mengurangi hak-hak generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya. Lukman Hakim, *Dasar-dasar Ekowisata* (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 8.

dianggap sebagai salah satu pintu masuk, sebagai suatu pendekatan ekonomi, yang menelaah dan mengkaji manfaat sumber daya alam dan lingkungan dalam kaidah-kaidah konservasi. Pengembangan jasa ekowisata dalam tingkat pengelolaan senantiasa berhubungan dengan kawasan-kawasan konservasi.

Kriteria kawasan konservasi taman nasional agaknya mampu menjadi landasan operasional pengembangan jasa ekowisata.²⁰ Taman nasional telah menjadi dasar dari berbagai usaha konservasi keanekaragaman hayati dalam skala nasional maupun internasional. Kelembagaan pengelolaan taman nasional berkembang cukup baik dan memenuhi kriteria pengembangan jasa ekowisata. Kelembagaan ekowisata di luar wilayah taman nasional juga dapat dikembangkan. Wilayah tujuan ekowisata tersebut biasanya memiliki karakteristik konservasi yang kuat baik dari aspek sosial maupun lingkungan. Pengembangan ekowisata di luar wilayah taman nasional banyak dikembangkan oleh organisasi masyarakat atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam ekowisata. Mereka ini biasanya memiliki pengetahuan ekowisata, informasi pasar, modal dan potensi wilayah tujuan ekowisata, baik secara individual, maupun membentuk jaringan dengan lembaga swadaya masyarakat, atau perguruan tinggi. Mereka mampu membangun jaringan informasi kepada pengunjung melalui berbagai media.

Pengembangan ekowisata di Indonesia dapat dipisahkan dalam tiga tahapan yang saling berkaitan, masing-masing pengaruh kolonial, kesepakatan konvensi *biodiversity* dan pengembangan komunitas ekowisata. Kesemua tahapan tersebut mengacu kepada upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati, sebagai komponen penting ekowisata. Indonesia bersama *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *United Nations Development Programme* (UNDP) telah

²⁰ Pengembangan jasa ekowisata dapat diarahkan kepada kriteria berikut: Kawasan konservasi, secara langsung atau tidak melekat budaya masyarakat lokal yang dengan waktu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya; Kawasan konservasi memiliki aspek legalitas, diperkuat dengan struktur kelembagaan pengelolaan ekosistem, yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan ketrampilan melengkapi jasa pariwisata secara umum; Kawasan konservasi yang memiliki standar dan prosedur sesuai dengan baku mutu pengelolaan lingkungan, keamanan dan kenyamanan; Kawasan konservasi yang memberi peluang kerja sama internasional, partisipasi pengelolaan oleh operator/swasta, dan pengembangan promosi. Iwan Nugroho, *op.cit.*, hlm. 27.

menyusun Rencana Konservasi Nasional (National Conservation Plan, NCP). Materi NCP menjadi komponen penting penyusunan Biodiversity Action Plan for Indonesian (BAPI) pada tahun 1993. BAPI kemudian mendapat tanggapan, yakni lebih tertuju terhadap kepentingan pemerintah, tidak memerhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.²¹

Pada tahun 2003, atas koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), revisi berhasil diselesaikan menjadi The Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP). Pesan pokok IBSAP adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. IBSAP berupaya meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis pengetahuan dan kearifan lokal. Di Indonesia, telah diidentifikasi kurang lebih 50 tujuan ekowisata dengan karakteristik budaya dan lingkungan yang khas. Taman nasional merupakan kawasan konservasi terpenting yang mengoperasikan kegiatan-kegiatan ekowisata tersebut. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2010-2014 sebagaimana dikutip dari Iwan Nugroho, pengembangan ekowisata sepanjang wilayah selatan pulau Jawa telah menjadi pilihan dalam arahan percepatan pembangunan pedesaan di dalam kerangka membangun keseimbangan ekonomi wilayah Jawa Bali.²²

Ekowisata Mangrove Blok Bedul merupakan salah satu wisata alam yang terletak di Kabupaten Banyuwangi. Secara geografis lokasi Ekowisata Mangrove Blok Bedul terletak pada 8° 36' 14.7744" LS dan 114° 16' 42.9179" BT, yakni berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Resort Grajagan.²³ Ekowisata Mangrove Blok Bedul berbatasan dengan Blok Bulu di sebelah barat, Desa Sumberasri di sebelah utara, Blok Kere di sebelah timur, dan Pantai Selatan di sebelah selatan. Secara administratif Ekowisata Mangrove Blok Bedul berada di

²¹ *Ibid*, hlm. 199.

²² *Ibid*, hlm. 28.

²³ <http://mangrovebedul.blogspot.co.id/2009/07/wisata-mangrove-blok-bedul-taman.html>, diakses pada 1 Oktober 2016 pukul 14.30 WIB.

Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi. Luas areal pengelolaan untuk menunjang kegiatan wisata sekitar 4 hektar.²⁴

Munculnya ide pengembangan ekowisata dimulai sejak tahun 2002 sebagai solusi untuk mengalihkan sumber pendapatan masyarakat dari sektor hutan, menghentikan kegiatan pencurian kayu serta perburuan yang terjadi di kawasan taman nasional.²⁵ Masyarakat sekitar kawasan taman nasional masih sangat bergantung dengan hasil hutan, seperti menebang dan mengambil kayu di wilayah Taman Nasional Alas Purwo serta Perhutani secara ilegal. Berbagai jenis pohon baik yang masih hidup, maupun yang mati dimanfaatkan masyarakat baik digunakan sendiri maupun dijual..

Kerusakan kawasan hutan tanaman serta hutan mangrove terjadi di kawasan Taman Nasional Alas Purwo dan Perhutani. Faktor penyebabnya beragam, baik faktor alami serta akibat kegiatan masyarakat sekitar kawasan yang merusak. Faktor alaminya terjadi karena perubahan iklim, serta penurunan kualitas tanah yang menyebabkan banyak tanaman gagal tumbuh. Penyebab non alaminya karena ulah manusia yang memanfaatkan sumber daya hutan yang cenderung merusak, tanpa menjaga dan melestarikan.

Kerapatan hutan mangrove menyusut sebagai akibat dari penurunan kualitas tanah serta pencurian kayu. Demikian pula hilangnya berbagai jenis kayu di kawasan perhutani. Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, kemudian digagas oleh masyarakat Desa Sumberasri bersama kepala desa Suyatno, dengan harapan dapat menghentikan kegiatan merusak alam tersebut. Wacana pengembangan wisata alam dengan memanfaatkan potensi desa yang berada di kawasan penyangga taman nasional diinisiasi oleh Kepala Desa Sumberasri. Wacana tersebut sebenarnya untuk mengangkat potensi yang dimiliki Desa Sumberasri.

Pada mulanya Pemerintah Desa Sumberasri secara sepihak menggagas wacana tersebut dengan membuka jalan menuju kawasan Bedul melalui hutan

²⁴ Badan Pengelola Wisata Mangrove Blok Bedul. *Profil Wisata Mangrove Blok Bedul*. (Banyuwangi: BUMDES Desa Sumberasri, 2010), hlm.1.

²⁵ Wawancara dengan Rohman Sugiarto, Banyuwangi, 10 November 2016.

milik Perhutani. Jalan yang masih berupa tanah dan batu tersebut tembus pada tahun 2002. Pemerintah desa juga membangun MCK di kawasan Bedul. Respon masyarakat terutama masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan Bedul cukup baik. Pada tahun 2005 jalan menuju bibir muara Segara Anakan dibangun dengan mengeruk dan mengurug tanah dengan lebar 1 meter sepanjang 150 meter serta diujungnya dibangun dermaga kecil dengan dana desa. Langkah sepihak Pemerintah Desa Sumberasri ternyata diapresiasi oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo.²⁶

Wacana pengembangan wisata Bedul tampak semakin jelas, dengan ditetapkannya Desa Sumberasri sebagai model desa konservasi oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2006 dengan master programnya adalah pengembangan wisata pantai Bedul. Pada 31 Januari 2007 pemerintah Desa Sumberasri melakukan kerjasama dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo mengenai pemanfaatan kawasan Bedul sebagai objek wisata alam terbatas.²⁷

Akhir tahun 2007 Desa Sumberasri kedatangan tamu dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang merupakan badan kerjasama internasional Jepang. JICA mempercepat terwujudnya pengembangan wisata Bedul yang kemudian lebih diarahkan pada pengembangan ekowisata. Atas kerjasama dari berbagai pihak tersebut kemudian dibentuk Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul (BPEMBB) pada 29 Oktober tahun 2008.

Pada pertengahan tahun 2009, Ekowisata Mangrove Blok Bedul dibuka untuk umum atas kesepakatan Pemerintah Desa Sumberasri dan Taman Nasional Alas Purwo, meskipun banyak sarana dan prasarana yang belum rampung dan memadai, objek wisata alam terbatas ini ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Meski belum dibuka secara resmi, Ekowisata Mangrove Blok Bedul mewakili Banyuwangi dalam Anugerah Wisata Nusantara Tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009, dan meraih The Best Commitment

²⁶ Wawancara dengan Suyatno, Banyuwangi, 14 Oktober 2018.

²⁷ Wawancara dengan Eko Kurniawan, Banyuwangi, 10 November 2016.

Ecotourism dalam kategori pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Berkat penghargaan tersebut Pemerintah Daerah Banyuwangi memberikan bantuan pengaspalan akses jalan utama dari Pasar Sumberasri menuju kawasan Bedul serta pembuatan dermaga yang lebih besar.

Ekowisata Mangrove Blok Bedul secara resmi dibuka oleh Bupati Banyuwangi pada 10 Oktober 2010. Dinamika perkembangan yang terjadi sejak awal dibangun dan dikembangkannya ekowisata ini berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Desa Sumberasri. Pada tahun 2012 Desa Sumberasri ditunjuk menjadi Percontohan Tingkat Nasional dalam pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat.²⁸ Desa Sumberasri dinilai berhasil melibatkan semua *stakeholder* mulai dari Pemerintah Daerah, Taman Nasional Alas Purwo, Perhutani dan menggandeng masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Tahun 2012 menandai berakhirnya kerjasama Pemerintah Desa Sumberasri dengan Taman Nasional Alas Purwo. Perjanjian kerjasama berganti menjadi izin usaha penyedia jasa wisata alam, dalam hal tersebut yakni ekowisata.

Berbagai informasi menarik tentang Konservasi Hutan Mangrove melalui pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul sebagai kawasan wisata berbasis lingkungan, membuat penulis tertarik mendeskripsikan mengenai konservasi ekosistem hutan mangrove dan dampak ekowisata terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sumberasri, baik dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul “Konservasi Hutan Mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tahun 2002-2012”. Konservasi memiliki pengertian sebagai upaya perlindungan dan pelestarian kawasan dilindungi. Mangrove merupakan ekosistem yang memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Secara ringkas pengertian judul skripsi

²⁸ Ika Ningtyas, “Wisata Mangrove Banyuwangi, Percontohan Nasional” [online], <https://travel.tempo.co/read/407289/wisata-mangrove-banyuwangi-percontohan-nasional>, diunduh pada 4 Oktober 2016.

ini adalah upaya pelestarian dan perlindungan hutan mangrove melalui pengembangan ekowisata mangrove.

Ada beberapa hal yang menguatkan penulis untuk mengambil judul ini sebagai dasar pertimbangan. Banyak yang menulis tentang sejarah Banyuwangi baik berupa buku maupun skripsi serta artikel ilmiah, namun belum ada yang menulis mengenai konservasi mangrove dari perspektif sejarah lingkungan. Alasan ini menguatkan penulis untuk mengangkat topik ini dalam skripsi. Selain itu, permasalahan kerusakan mangrove menjadi isu lingkungan yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana proses sebelum terjadinya kerusakan mangrove, sampai pada upaya konservasi hutan mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul yang digagas masyarakat serta pemerintah Desa Sumberasri. Kemudian didukung dengan tersedianya data atau sumber yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi. Selain itu, secara emosional, penulis tertarik dengan topik ini karena penulis merupakan putra daerah yang ingin memiliki kontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan tanah kelahirannya. Demikian penulis tidak meninggalkan kaidah-kaidah ilmiah dalam penyusunannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada bahasan dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah penting dalam tulisan ini, yaitu:

- a. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi konservasi mangrove?
- b. Bagaimana upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove di kawasan Blok Bedul?
- c. Apa dampak konservasi hutan mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Di dalam suatu penelitian haruslah terdapat tujuan penelitian yang jelas agar nantinya penulisan dapat terarah dan diketahui maksudnya. Tujuan

pembahasan berfungsi sebagai sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya konservasi hutan mangrove di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.
2. Mengetahui upaya pemerintah dan masyarakat kawasan Taman Nasional Alas Purwo dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove.
3. Menjelaskan mengenai dampak konservasi hutan mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan oleh peneliti. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti antara lain.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan koleksi tentang penelitian sejarah lingkungan Indonesia, khususnya mengenai konservasi mangrove, memberikan tambahan informasi terhadap penulisan karya sejarah sejenis selanjutnya, terutama bagi peminat sejarah lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait upaya konservasi kawasan pesisir dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada.
3. Bagi penulis sebagai wahana aplikasi serta hasil dari pemahaman teori yang selama ini penulis terima dalam bangku perkuliahan.

1.4 Ruang Lingkup

Langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis adalah membagi ruang lingkup permasalahan yang akan diambil, baik lingkup spasial, lingkup temporal, serta lingkup kajian. Penentuan ruang lingkup bertujuan untuk menghindari penyimpangan materi pokok bahasan. Cakupan masalah dalam penelitian ini sangat kompleks dan agar penelitian ini lebih terfokus pada titik persoalan sehingga dapat menjawab substansi permasalahan secara memadai.

Lingkup spasial (ruang geografis) dalam penelitian ini adalah Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Lingkup spasial ini ditetapkan berdasar pada pertimbangan bahwa Ekowisata Mangrove Blok Bedul berada di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo. Lingkup spasial ini meliputi wilayah konservasi hutan mangrove yakni kawasan penyangga Taman Nasional Alas Purwo. Kawasan penyangga merupakan kawasan penting yang mendukung ekosistem utama taman nasional.

Lingkup temporal (ruang waktu) dalam penulisan ini yakni mengambil tahun 2002 sampai tahun 2012. Tahun 2002 ditetapkan sebagai batasan awal, dimana pada tahun tersebut ide pengembangan Bedul sebagai wisata alam digagas oleh masyarakat Desa Sumberasri bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Perhutani dan Taman Nasional Alas Purwo. Tahun tersebut merupakan awal penting, sebab hutan mangrove di kawasan Blok Bedul telah mengalami kerusakan akibat pencurian kayu serta perubahan kualitas tanah. Upaya konservasi sekaligus mengembangkan potensi keindahan alam menjadi tempat wisata menjadi acuan dasar dibentuknya Ekowisata Mangrove Blok Bedul.

Batas akhir dari skup temporal penelitian ini adalah tahun 2012. Hal tersebut didasari oleh berakhirnya perjanjian kerjasama antara Desa Sumberasri dan Taman Nasional Alas Purwo. Perjanjian kerjasama tersebut kemudian berganti menjadi izin usaha penyediaan jasa wisata alam, dalam hal tersebut ekowisata. Meskipun baru diresmikan selama dua tahun oleh bupati dan dibuka untuk umum, namun Ekowisata Mangrove Blok Bedul menjadi destinasi wisata alam yang mampu memberikan pengaruh besar dalam upaya konservasi hutan mangrove serta memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sumberasri. Upaya konservasi hutan mangrove pun berjalan bersama kegiatan pariwisata melalui paket-paket wisata yang ditawarkan, antara lain pendidikan lingkungan hidup, pembibitan mangrove, serta penanaman pohon mangrove yang bertujuan menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove.

Adapun lingkup kajian dalam penelitian ini yaitu termasuk dalam sejarah lingkungan.²⁹ Kajian ini berfokus pada upaya konservasi hutan mangrove melalui ekowisata. Ekowisata dipandang sebagai wisata yang memiliki fungsi kompleks yakni sebagai tujuan wisata alam yang mendukung upaya menjaga kelestarian alam serta upaya konservasi keanekaragaman hayati. Tulisan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana dampak konservasi hutan mangrove melalui pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul terhadap kehidupan sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Serta dampak lingkungan terhadap ekosistem di kawasan penyangga taman nasional.

1.5 Tinjauan Pustaka

Sebuah karya ilmiah termasuk dalam bidang ilmu sejarah selalu diikuti tinjauan pustaka sebagai perbandingan sekaligus rujukan dalam pembahasan. Tinjauan pustaka berisi tentang uraian sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.³⁰ Pada dasarnya, tinjauan pustaka disertakan dengan tujuan terciptanya karya yang kreatif dan orisinal.

Buku karya Purwowibowo dan Soni Akhmad Nulhaqim yang berjudul *Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang*, berisi tentang upaya rehabilitasi kawasan hutan mangrove di Desa Pasar Banggi Kabupaten Rembang. Buku ini menjelaskan mengenai proses awal inisiatif pengelolaan kawasan hutan mangrove yang berbatasan dengan pertambakan dan pemukiman penduduk, sampai pada

²⁹ Menurut Richard Grove, sejarah lingkungan adalah bagian kisah yang terdokumentasi secara historis mengenai kehidupan dan kematian... masyarakat dan spesies dalam hubungan dengan dunia sekitar mereka. Definisi ini menekankan dokumentasi kisah hubungan antara manusia dan lingkungan tempat mereka hidup, yang juga mencakup spesies lain, artinya agen selain manusia atau hewan dimasukkan juga di dalamnya. Lihat Richard Grove, et al (ed), "Nature and the Orient: The Environmental History of South and Southeast Asia" sebagaimana dikutip dalam Nawiyanto, *Pengantar Sejarah Lingkungan* (Jember: Jember University Press, 2012), hlm. 2-3.

³⁰ Nurhadi Sasmita, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Yogyakarta: Lembah Manah, 2012), hlm. 23.

terbentuknya komunitas tani tambak yang merehabilitasi hutan mangrove.³¹ Karya ini mengilhami penulis dalam memahami pengelolaan kawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pasar Banggi. Model pengembangan dan pengelolaannya dilakukan bersama komunitas masyarakat tambak yang memiliki keresahan yang sama terkait masalah erosi kawasan perairan payau. Karya ini memiliki kesamaan bahasan yakni mengenai pengelolaan kawasan hutan mangrove oleh masyarakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada pola dan bentuk pengelolaan. Dalam karya Purwowibowo dan Soni menceritakan tentang rehabilitasi kawasan hutan mangrove guna menunjang kawasan tambak, sedangkan skripsi ini menceritakan tentang rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove melalui ekowisata.

Buku berjudul *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*, karya Robert Siburian dan John Haba merupakan hasil penelitian pada tahun 2012, 2013 dan 2014 di Kabupaten Belitung dan Bangka Barat. Buku ini berisi sembilan tulisan yang dibahas oleh para ahli yang mengkaji mengenai mangrove sebagai ekosistem yang multifungsi. Secara garis besar buku ini mendeskripsikan mengenai kerusakan hutan mangrove, upaya konservasi hutan mangrove hingga memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove di Kabupaten Belitung dan Bangka Barat.³² Buku ini sangat membantu penulis dalam memahami bagaimana proses rehabilitasi hutan mangrove, pengambilan kebijakan serta upaya masyarakat dalam membantu upaya konservasi mangrove. Memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan potensi mangrove sebagai sumber daya yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat pesisir maupun non-pesisir. Memberikan manfaat untuk menambah khazanah pengetahuan dan keilmuan dalam mengonservasi suatu ekosistem mangrove dengan mengedepankan nilai kearifan lokal yang menjadi asset masyarakat.

³¹ Purwowibowo dan Soni Akhmad Nulhaqim, *Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang* (Yogyakarta: Pandiva Book, 2016).

³² Robert Siburian dan John Haba (ed), *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

Tulisan Saifullah dan Nurdin Harahap yang berjudul “Strategi Pengembangan Wisata Mangrove di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur” yang termuat dalam *Jurnal of Indonesian Tourism and Development Studies* Vol. 1 No.2 Tahun 2013 membahas mengenai strategi dalam pengembangan potensi kawasan mangrove Blok Bedul. Potensi yang terdapat di kawasan Blok Bedul meliputi potensi flora dan fauna, potensi wisata yang dapat dikembangkan untuk memberikan nilai ekonomi pada masyarakat setempat.³³ Tulisan ini memberikan gambaran bagi penulis mengenai langkah strategis pemerintah Desa Sumberasri, serta lembaga terkait dalam menjalankan rencana pengelolaan kawasan hutan mangrove Blok Bedul. Tulisan tersebut memiliki kesamaan bahasan dengan skripsi ini, yakni mengenai pengembangan wisata mangrove di kawasan Blok Bedul. Perbedaannya terletak pada fokus kajian serta metode dalam penulisannya. Fokus kajian dalam tulisan tersebut yakni mengenai strategi pengembangannya, sedangkan dalam skripsi ini mengenai upaya konservasi hutan mangrove dalam kerangka pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove melalui ekowisata. Metode penulisan dalam tulisan tersebut yakni deskriptif kualitatif berdasar pada data primer dan sekunder yang diambil langsung di lapangan, sedangkan skripsi ini bersifat deskriptif analitis yakni berusaha mendeskripsikan peristiwa konservasi hutan mangrove melalui ekowisata tersebut secara kronologis.

Dwi Yandhi Febriyanti dalam skripsinya yang berjudul “Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi”, menjelaskan mengenai nilai manfaat hutan mangrove yang memiliki tiga fungsi sekaligus. Fungsi tersebut meliputi fungsi fisik, ekologis dan ekonomis.³⁴ Karya ini membantu penulis mengetahui kondisi

³³ Saifullah dan Nurdin Harahap, “Strategi Pengembangan Wisata Mangrove di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur” dalam *Jurnal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol. 1, No. 2, 2013.

³⁴ Dwi Yandhi Febriyanti, “Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi”, *Skripsi* pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2007.

hutan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo, mengetahui manfaat dan nilai ekonomi hutan mangrove bagi masyarakat di sekitar kawasan taman nasional, serta kontribusi hutan mangrove terhadap pendapatan rumahtangga masyarakat. Tulisan ini memiliki kesamaan yakni scope spasial berada di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo, serta mengkaji mengenai mangrove, namun perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Tulisan Dwi Yandhi Febriyanti mengkaji mengenai nilai manfaat hutan mangrove bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, sedangkan skripsi ini mengkaji mengenai upaya konservasi hutan mangrove melalui ekowisata yang memiliki berbagai dampak bagi kelangsungan kehidupan taman nasional serta masyarakat sekitar hutan.

Skripsi karya Endrik Finta Sanjaya yang berjudul “Relasi Antara Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Deskriptif di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi) membahas mengenai hubungan kerjasama Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa Sumberasri dalam pengelolaan hutan mangrove di kawasan Blok Bedul.³⁵ Skripsi ini membantu penulis dalam memahami hubungan kerjasama dua pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan kawasan hutan mangrove. Skripsi tersebut memberikan gambaran pola hubungan, bentuk kerjasama, serta proses pengelolaan kawasan hutan mangrove menjadi Ekowisata. Persamaan skripsi tersebut dengan karya penulis terdapat pada scope spasial serta bahasan mengenai pengelolaan hutan mangrove. Perbedaannya terletak pada lingkup kajian yang dibahas, skripsi tersebut berusaha mengkaji relasi antara dua lembaga dalam pengelolaan hutan mangrove dalam kacamata sosiologi, sedangkan skripsi ini berusaha mengkaji secara deskriptif dalam kacamata sejarah lingkungan.

³⁵ Endrik Finta Sanjaya, “Relasi Antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Deskriptif di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi* pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2013.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Penulisan sejarah memerlukan pendekatan dan kerangka teori, sehingga tidak berdiri sendiri tanpa arah dan tujuan, oleh karena itu penulisan sejarah membutuhkan ilmu bantu.³⁶ Fungsi dari pendekatan adalah jembatan bagi ilmu sejarah untuk dapat melihat permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Kajian atau analisis terhadap suatu objek penelitian akan memperoleh hasil yang optimal apabila didukung oleh teori yang sesuai. Oleh karena itu dalam menggunakan teori harus relevan terhadap tujuan dari penelitian.

Tulisan ini melihat upaya konservasi hutan mangrove dari sejarah lingkungan dengan menggunakan pendekatan sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan mengkaji mengenai hubungan antarmanusia atau mengkaji tentang kehidupan sosial dalam kaitannya dengan sumber daya lingkungan. Menurut Dunlap dan Catton, sosiologi lingkungan dibangun dari beberapa konsep yang saling berhubungan yaitu, persoalan-persoalan lingkungan dan ketidakmampuan sosiologi konvensional untuk membicarakan persoalan-persoalan tersebut merupakan cabang dari pandangan dunia yang gagal menjawab dasar-dasar biofisik struktur sosial dan kehidupan sosial.³⁷

Masyarakat modern tidak berkelanjutan sebab mereka hidup pada sumber daya yang terbatas dan penggunaan atas ekosistem jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan ekosistem memperbaharui dirinya sendiri. Proses ini diperparah dengan pertumbuhan populasi secara cepat. Kemudian masyarakat menuju tingkatan yang lebih besar berhadapan dengan kondisi yang rentan ekologis. Ilmu lingkungan modern telah mendokumentasikan persoalan lingkungan tersebut dan mengakibatkan kebutuhan yang lebih besar untuk menyesuaikan jika krisis lingkungan ingin dihindari. Pengenalan dimensi-dimensi krisis lingkungan menyumbang pada pergeseran paradigma dalam masyarakat secara umum.

³⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 2.

³⁷ Dunlap dan Canton, sebagaimana dikutip dalam Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

Perbaikan dan reformasi lingkungan akan dilahirkan melalui perluasan paradigma ekologi baru di antara masyarakat.

Permasalahan kerusakan ekosistem mangrove berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Skripsi ini menggunakan pendekatan yang saling berhubungan satu sama lain, agar skripsi ini mampu memberikan hasil yang objektif dan mampu memberikan informasi berdasarkan data dari lapangan dan tidak memihak ke satu pihak, baik sisi lingkungan maupun ekonomi.

Guna menjelaskan proses kerusakan ekosistem mangrove sampai pada upaya konservasi hutan mangrove melalui ekowisata perlu diungkap kaitannya dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar. Pemenuhan kebutuhan hidup dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut menjadi faktor awal pemicu kerusakan ekosistem kawasan hutan. Pencurian kayu yang terjadi di tahun 90-an sampai pasca reformasi merupakan akibat dari ketergantungan masyarakat sekitar akan hasil hutan. Pencurian kayu tidak hanya menasar hutan di kawasan taman nasional, melainkan juga kawasan hutan milik Perhutani. Komoditas kayu berbagai jenis dari hutan taman nasional serta Perhutani banyak dimanfaatkan sebagai material bangunan atau untuk dijual. Eksploitasi yang dilakukan tersebut diperparah dengan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan mangrove bagi keberlangsungan hidup di wilayah pesisir.

Semakin meluasnya kerusakan ekosistem kawasan hutan dikhawatirkan dapat mengganggu kehidupan ekosistem utama taman nasional. Pemerintah Desa Sumberasri kemudian memberikan pemahaman melalui penyuluhan terkait pencurian kayu yang terjadi di kawasan penyangga taman nasional. Melalui pertemuan dengan tokoh masyarakat, pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo serta Perhutani digagaslah upaya perlindungan kawasan penyangga taman nasional serta pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan taman nasional. Ide dasar tersebut muncul dari Kepala Desa Sumberasri pada saat itu yakni Suyatno yang berkeinginan besar mengalihkan kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hutan dengan cara merusak menjadi melindungi dan melestarikan. Usulan tersebut memiliki tujuan untuk mengelola

segala potensi yang dimiliki Desa Sumberasri dengan mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Gagasan tersebut kemudian memunculkan gerakan sosial masyarakat, merubah paradigma masyarakat di sekitar kawasan taman nasional menjadi peduli terhadap ekosistem hutan mangrove yang memiliki fungsi dan manfaat besar bagi kelangsungan hidup wilayah pesisir. Masyarakat kemudian berangsur-angsur menolak perusakan hutan mangrove dan mendukung upaya pelestarian ekosistem mangrove. Untuk menganalisis gerakan ini akan diadopsi dari teori gerakan sosial.

Menurut Jean Cohen, gerakan sosial secara teoritis dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama umumnya berbasis kelas dan ideologi dengan fokus gerakan terarah pada isu redistribusi sumber daya ekonomi, dan muncul dalam konteks masyarakat industri. Sementara itu, gerakan sosial baru memiliki basis lebih luas, menembus sekat-sekat kelas. Gerakan sosial ini lebih menonjolkan pada isu-isu yang lebih luas, seperti isu anti rasis, anti nuklir, feminisme, lingkungan, etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan perdamaian.³⁸

Berdasarkan pada penelitian ini. Peneliti lebih memfokuskan pada teori gerakan sosial baru sebagai pisau analisis karena aksi masyarakat sekitar kawasan taman nasional tertuju pada isu lingkungan yaitu upaya pelestarian ekosistem hutan mangrove yang mempunyai dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah Desa Sumberasri memanfaatkan potensi ekosistem hutan mangrove sebagai kawasan wisata alam yang tentu memberikan pemasukan ekonomi masyarakat sekitar.

Dari ulasan di atas dukungan masyarakat dalam pelestarian serta pemanfaatan potensi ekosistem hutan mangrove menjadi modal utama upaya konservasi yang telah digagas pemerintah Desa Sumberasri dan Balai Taman Nasional Alas Purwo. Upaya tersebut mendapat respon positif dari pemerintah daerah serta pihak terkait dengan tujuan utama pelestarian ekosistem hutan

³⁸ Jean Cohen, sebagaimana dikutip dalam Joni Rusmanto, *Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahannya* (Sidoarjo: Zifatama Publishing dan Universitas Palangkaraya, 2013), hlm. 24.

mangrove yang terdapat di Blok Bedul. Dengan demikian, peneliti menyoroti dari aspek sosiologi-lingkungan dengan mengarah pada gerakan sosial pelestarian serta pemanfaatan potensi ekosistem hutan mangrove, yang muncul akibat adanya kerusakan ekosistem hutan mangrove, yang merupakan kawasan penyangga taman nasional yang sangat penting.

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk memahami suatu objek yang dijadikan sebagai sasaran yang akan dikaji. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis data-data atau rekaman dan peninggalan masa lampau.³⁹ Penelitian sejarah pada dasarnya memiliki empat tahap utama, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sebanyak apapun langkah yang diterapkan sejarawan dalam penelitian, keempat tahap tersebut harus dimunculkan atau harus ada.

Pada dasarnya yang disebut metode adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk mendapatkan obyek. Pendapat lain mengatakan bahwa metode sejarah adalah cara berbuat atau mengerjakan suatu hal dalam suatu system yang direncanakan dan teratur. Metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknis yang sistematis untuk melakukan penelitian tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan obyek penelitian.⁴⁰

Adapun tahapan-tahapan dalam metode sejarah yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan sumber (heuristik)

Heuristik adalah suatu cara untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah otentik yang berkaitan dengan topik kajian. Dalam penelitian ini penulis

³⁹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* penerjemah Nugroho Notosusanto, Edisi Kedua, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

⁴⁰ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 11.

menggunakan sumber yang bersifat primer dan sekunder.⁴¹ Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku sejarah, dokumen-dokumen maupun sumber tertulis lainnya. Sumber primer dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa data dari berbagai pihak berupa surat perjanjian kerjasama, surat keterangan, media foto, dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber primer dalam bentuk lisan digali dengan cara wawancara kepada kepala desa, mantan kepala desa, pihak Balai TNAP, ketua BUMDES Loh Jinawe, serta pengurus BPWMBB. Informasi ini dikumpulkan dengan metode sejarah lisan. Wawancara juga dilakukan dengan mantan pelaku pencurian kayu, kepala pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul, karyawan pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul, serta masyarakat yang diberdayakan di lokasi ekowisata, seperti pemandu wisata, pemilik warung, dan pemilik kapal *gondang-gandung*.

Selain sumber primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder, yang dikumpulkan untuk menambah data penelitian. Sumber ini didapatkan atas kesaksian orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa namun mengerti permasalahan tersebut. Adapun yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku dari peneliti lainnya atau segala bentuk penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sumber sekunder lainnya diperoleh dari koran harian *Jawa Pos* dan *Radar Banyuwangi*, berbagai majalah baik cetak maupun *online*, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang senada dengan skripsi ini,

b. Kritik sumber (kritik intern dan ekstern)

Kritik sumber terbagi atas dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern membuktikan valid atau tidaknya isi sumber, digunakan untuk menentukan kredibilitas sumber (dapat dipercaya atau tidak).⁴² Sedangkan kritik

⁴¹ Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

⁴² Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 16.

ekstern untuk menilai keaslian atau keotentikan sumber sejarah atau informasi yang diperoleh. Terjadinya kesalahan data dan informasi kemungkinan besar sering terjadi. Oleh karena itu, pada tahap ini segala data yang diperoleh tidak langsung diambil melainkan perlu dilakukan kritik intern maupun ekstern, baik data tersebut berupa tulisan atau bukan tulisan untuk menguji otentisitas dan kredibilitas datanya. Peneliti perlu menyeleksi mana yang relevan dengan pokok penelitiannya, kemudian menyediakannya lewat pengolahan sebagai fakta-fakta. Hasil kritik-kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau rekonstruksi cerita sejarah.⁴³

c. Penafsiran sumber (interpretasi)

Interpretasi terbagi menjadi dua tahap yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menggabungkan informasi kredibel sumber-sumber yang telah terkumpul dalam bentuk argumentasi. Pada tahap ini peneliti mencari keterkaitan antara semua fakta yang ditemukan berdasarkan hubungan kronologis, kausalitas (sebab-akibat) dengan berimajinasi, interpretasi dan juga teorisasi.⁴⁴ Hal ini harus dilakukan, sebab fakta-fakta sejarah yang diperoleh peneliti belum menunjukkan suatu kejelasan makna, masih merupakan kumpulan fakta yang tidak saling berhubungan.

d. Penulisan sejarah (historiografi)

Historiografi diartikan sebagai kegiatan merekonstruksi peristiwa sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah dalam bentuk kisah yang dituangkan secara tertulis. Metode penulisannya bersifat deskriptif analitis, yakni memaparkan suatu peristiwa yang diteliti secara kronologis serta mampu mengungkapkan kausalitas berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Hasilnya adalah konstruksi historiografis dalam bentuk skripsi yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara kronologis. Dengan demikian tulisan ini akan dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

⁴³ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 16.

⁴⁴ Nurhadi Sasmita. dkk, *op. cit*, hlm. 28.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012” ini dibagi menjadi 4 bab, yang masing-masing bab merupakan suatu kesatuan yang berurutan. Adapun rencana atau rancangan bagian isi skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Ruang Lingkup, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

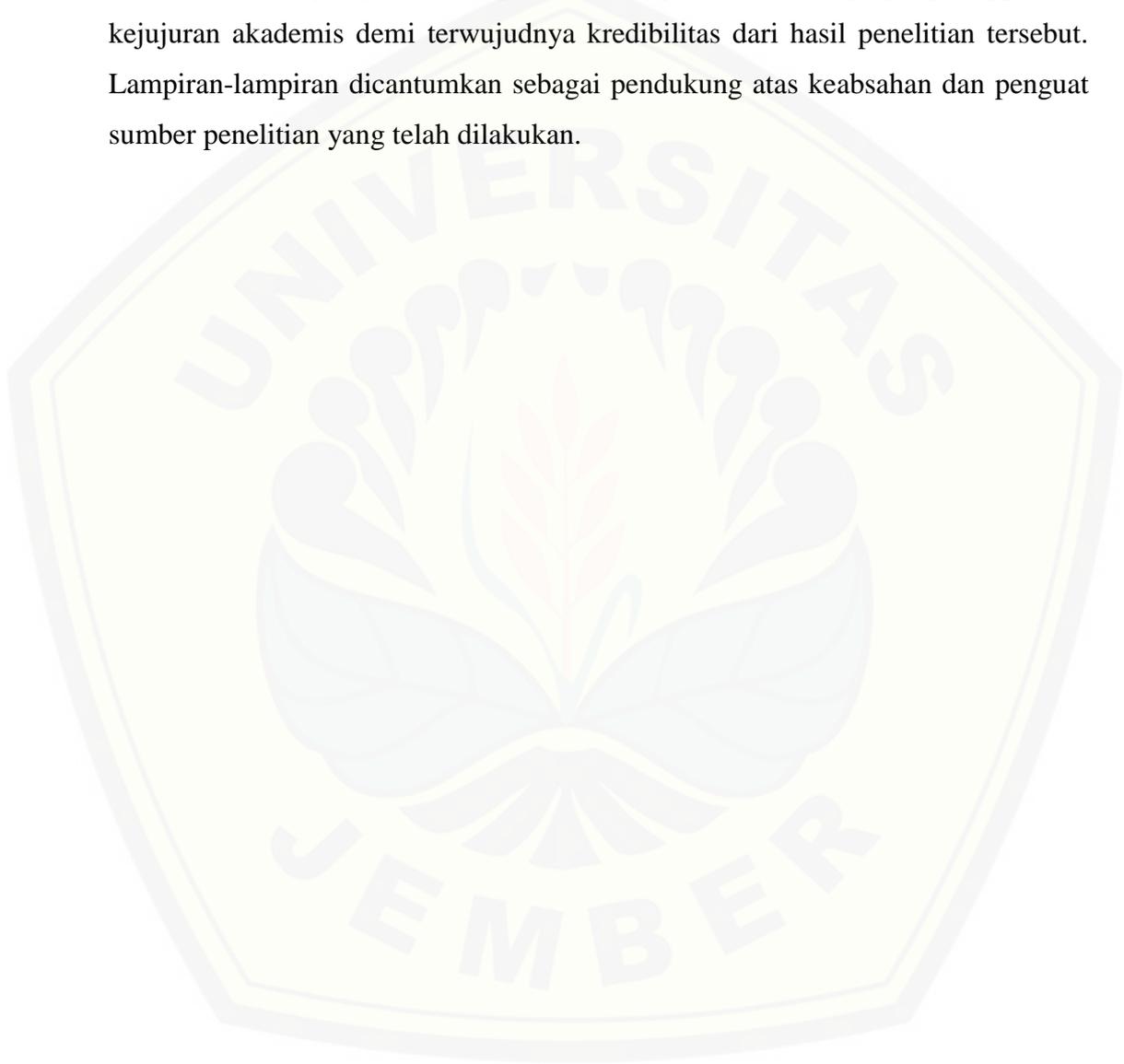
BAB II berisi tentang gambaran mengenai Kondisi Hutan Mangrove di Blok Bedul Desa Sumberasri. Untuk memaparkannya peneliti merangkai bab ini terdiri dari tiga subbab. Subbab pertama yakni mengenai Kawasan Penyangga Taman Nasional, subbab kedua yaitu Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Mangrove oleh Masyarakat Taman Nasional, subbab ketiga mengenai Kerusakan Hutan Mangrove di Blok Bedul yang menjelaskan tentang proses kerusakan ekosistem hutan mangrove yang diakibatkan oleh kegiatan pencurian kayu serta pemanfaatan sumber daya hutan yang berlebihan.

BAB III berisi tentang Upaya Konservasi Hutan Mangrove di Blok Bedul Desa Sumberasri yang menjelaskan mengenai langkah-langkah pemerintah desa, pemerintah kabupaten serta balai taman nasional terhadap masalah kerusakan ekosistem mangrove. Pada bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu, subbab pertama mengenai Kesadaran Masyarakat Desa Sumberasri tentang Kelestarian Hutan Mangrove, subbab kedua Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul, subbab ketiga Pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul, subbab keempat mengenai Dampak Konservasi Hutan Mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul dibagi menjadi beberapa sub-sub lagi, subbab pertama Dampak Sosial, subbab kedua Dampak Ekonomi, subbab ketiga Dampak Lingkungan.

BAB IV kesimpulan, merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam bab pembahasan dan menjadi kriteria penilaian-penilaian terhadap bahasan penulis yakni mengenai Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata

Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2012. Uraian ini sekaligus menjadi penutup untuk mengakhiri penulisan ini.

Peneliti mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pada sistematika selanjutnya. Daftar pustaka bertujuan demi menjunjung tinggi nilai kejujuran akademis demi terwujudnya kredibilitas dari hasil penelitian tersebut. Lampiran-lampiran dicantumkan sebagai pendukung atas keabsahan dan penguat sumber penelitian yang telah dilakukan.



BAB 2

KONDISI HUTAN MANGROVE DI BLOK BEDUL DESA SUMBERASRI

2.1 Kawasan Penyangga Taman Nasional

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengertian panjangnya yakni kawasan pelestarian alam sebagai salah satu kawasan konservasi yang berpedoman pada tiga pilar konservasi yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹

Suatu kawasan hutan ditetapkan sebagai Taman Nasional memiliki kriteria sebagai berikut, antara lain :

1. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
2. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

¹ SK Presiden Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990., hlm. 4.

4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam zonasi, antara lain zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Secara historis Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan hutan di Semenanjung Blambangan. Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, kawasan hutan tersebut ditetapkan sebagai Cagar Alam Purwo dan Djatie Ikan (Natuurmonumenten Poerwo en Djatie Ikan) berdasarkan Besluit van den Goeverneur Generaal Van Nederlandsch – Indie van 9 Oktober 1920 No.46 Staatsblad No. 736. Statusnya kemudian berubah menjadi Suaka Margasatwa Banyuwangi (Wildreservaat aid Banjoewangi) seluas 62.000 ha berdasarkan Besluit van den Goeverneur Generaal Van Nederlandsch – Indie van 1 September 1936 No. 6 Staatsblad No. 456. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa kawasan tersebut terdiri dari hutan jati (Djati bosch) dan hutan alam purwo (Wildhout Bosch Poerwo).²

Pasca kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1960 sebagian wilayah Suaka Margasatwa diubah menjadi hutan produksi dibawah pengelolaan Perhutani dengan komoditas utama tanaman jati. Perkembangan selanjutnya kawasan Suaka Margasatwa Banyuwangi menjadi salah satu wilayah kerja pengelolaan Balai Taman Nasional Baluran.³ Pada 27 Mei 1983 berdasakan berita acara pengukuran, luas kawasan berubah menjadi 43.420 ha. Luas kawasan berdasarkan pembagian zonasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 51/Kpts/Dj-IV/1987 tanggal 12 Desember 1987, terbagi atas:

1. Zona Inti 17.200 ha
2. Zona Rimba 24.767 ha

² Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo Periode 2016-2025, Banyuwangi 2015., hlm. 5.

³ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Alas Purwo Periode Tahun 2015-2019, Banyuwangi 2014., hlm. 5.

3. Zona Pemanfaatan 250 ha
4. Zona Penyangga 1.303 ha.⁴

Pada tahun 1992, Menteri Kehutanan menetapkan Suaka Margasatwa Banyuwangi menjadi Taman Nasional Alas Purwo. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:283/Kpts-II/1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang Perubahan fungsi dan penunjukan Suaka Margasatwa Banyuwangi yang terletak di Kab. Daerah Tingkat II Banyuwangi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 43.420 Ha menjadi Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Alas Purwo.⁵

Taman Nasional Alas Purwo sebagai Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dikelola dengan sistem zonasi. Pada tahun 2005 dilakukan revisi zonasi TNAP terkait dengan usulan zona pemanfaatan dan perubahan eks zona penyangga menjadi zona tradisional dan zona rehabilitasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : 26/Kpts/IV-KK-2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Revisi Zonasi Taman Nasional Alas Purwo. Luas kawasan kemudian berubah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3629/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 6 Mei 2014 dengan luas 44.037 ha.⁶

Dalam Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Alas Purwo Periode 2015-2019, Taman Nasional Alas Purwo sebagai Kawasan Pelestarian Alam dikelola dengan sistem zonasi dengan zona-zona sebagai berikut:

1. Zona Inti seluas ± 12.354,78 ha. Terletak di tengah kawasan Taman Nasional Alas Purwo mulai dari Teluk Banyubiru, Tanjung Pasir, dan melingkar ke arah selatan kemudian ke barat dan ke utara kembali ke Teluk Banyubiru.

⁴ Taman Nasional Alas Purwo, Buku Informasi Balai Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi 2011., hlm. 7.

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

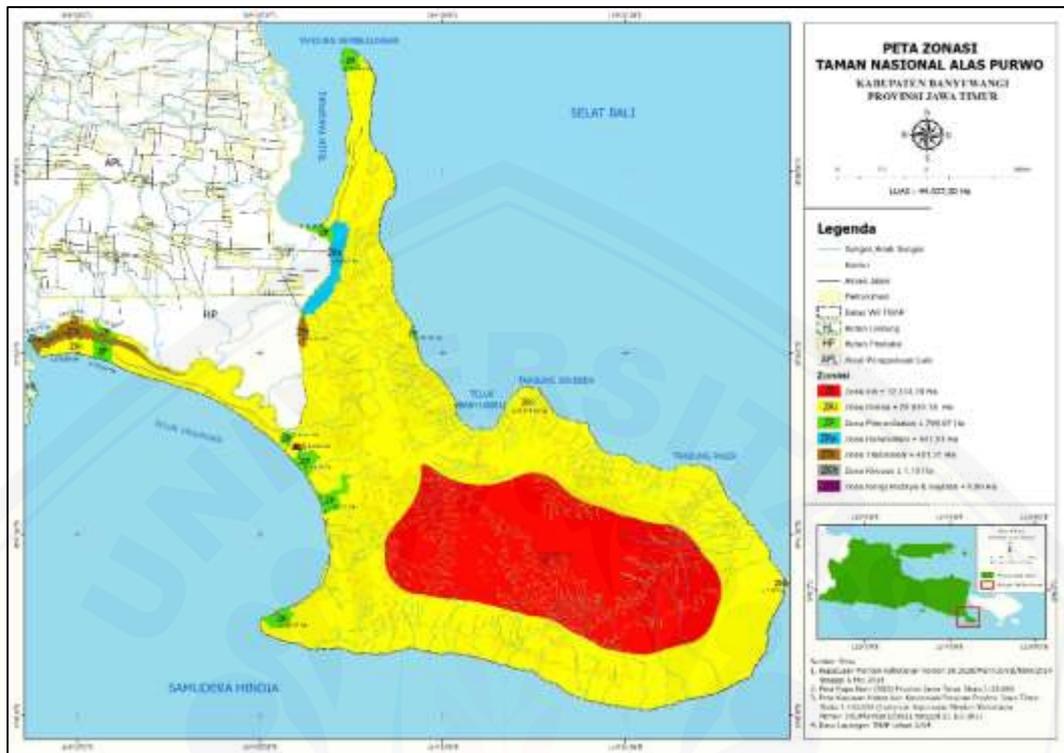
⁶ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan, *op.cit.*, hlm. 7.

2. Zona Rimba seluas $\pm 29.946,18$ ha. Terletak mengelilingi Zona Inti mulai dari arah barat daya menuju arah selatan dan timur Taman Nasional Alas Purwo.
3. Zona Rehabilitasi seluas $\pm 447,91$ ha. Terletak di sebelah tepi barat laut kawasan dan berbatasan langsung dengan Zona Rimba dan Tradisional.
4. Zona Pemanfaatan seluas $\pm 796,07$ ha. Meliputi Blok Bedul seluas ± 30 Ha, Blok Triangulasi Rowobendo seluas ± 100 Ha, Blok Pancur seluas ± 150 Ha, Blok Plengkung seluas ± 100 Ha, Blok Sembulungan seluas ± 50 Ha, Blok Kayu Aking seluas ± 80 Ha, Blok Perpat seluas ± 50 Ha, dan Blok Sumur Tong seluas ± 100 Ha.
5. Zona Tradisional seluas $\pm 481,31$ ha. Meliputi Blok Segoro Anakan seluas ± 200 Ha, dan kawasan seluas ± 583 Ha di tepi bagian selatan.
6. Zona Religi Budaya dan Sejarah seluas $\pm 9,9$ ha. Zona ini merupakan zona yang ditetapkan sebagai Situs Budaya di kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang meliputi Situs Kawitan, Pura Giri Salaka, Goa Istana serta beberapa situs bersejarah lainnya.
7. Zona Khusus seluas $\pm 1,15$ ha. Zona khusus ini ditetapkan sebagai kawasan yang memiliki tempat sarana dan prasarana penunjang kehidupan yang ada sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional. Zona khusus tersebut merupakan sebuah bangunan mercusuar.⁷

Taman Nasional Alas Purwo menjadi salah satu kawasan pelestarian alam yang sebagian besar daerahnya berbatasan langsung dengan laut. Selain berbatasan dengan laut, Taman Nasional Alas Purwo juga berbatasan dengan kawasan hutan Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan. Secara astronomis Taman Nasional Alas Purwo berada diantara $114^{\circ}20'16''$ - $114^{\circ}36'00''$ BT dan $8^{\circ}6'46''$ - $8^{\circ}47'00''$ LS, di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Taman Nasional Alas Purwo terletak di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Muncar, Tegaldlimo, dan Purwoharjo.

⁷ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Induk, *op.cit.*, hlm. 5.

Gambar 2.1. Peta Zonasi Taman Nasional Alas Purwo



Sumber: Arsip Balai Taman Nasional Alas Purwo tahun 2011.

Formasi geologi Taman Nasional Alas Purwo terdiri dari batuan berkapur dan batuan berasing. Karakteristik geologi tersebutlah yang menyebabkan Taman Nasional Alas Purwo memiliki setidaknya 44 goa yang tersebar di dalam kawasannya. Jenis tanah di Taman Nasional Alas Purwo terdiri atas 4 kelompok, yaitu Mediteran Merah – Litosol seluas 2.106 ha, Regosol Kelabu seluas 6.238 ha, Grumusol Kelabu seluas 379 ha, dan Aluvial Hidromorf seluas 34.697 ha.⁸

Topografi Taman Nasional Alas Purwo terdiri dari daerah pantai (perairan, daratan, dan rawa), daerah dataran hingga perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian 0 – 322 mdpl dengan puncak tertinggi Gunung Lingga Manis. Daerah pantai melingkar mulai dari Segoro Anakan (Grajagan) sampai dengan daerah Muncar dengan panjang garis pantai sekitar 105 km.

Taman Nasional Alas Purwo memiliki curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan mencapai 1.079 mm sampai dengan 1.554

⁸ Taman Nasional Alas Purwo, Buku Informasi, *op.cit.*, hlm. 8.

mm dengan suhu udara minimum bulanan antara 20,7 °C – 22,5 °C, suhu udara maksimum antara 31,2 °C – 34,5 °C, dan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara 25,9 °C – 28,2 °C, serta kelembaban udara berkisar antara 75% - 81%. Arah angin sebagian besar bertiup ke arah selatan dengan kecepatan antara 2,3 – 4,2 knot.⁹

Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan hutan yang mempunyai berbagai macam tipe ekosistem yang tergolong utuh di Pulau Jawa. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁰ Ekosistem yang dimiliki Taman Nasional Alas Purwo meliputi hutan pantai, hutan mangrove, hutan hujan dataran rendah, padang savana, hutan bambu dan hutan tanaman.

1. Ekosistem hutan pantai terdapat di bagian selatan dari arah Grajagan (Segoro Anakan) membentang ke timur dan utara sampai Tanjung Sembulungan sejauh kurang lebih 110 km. Lebar rata-rata vegetasi dari pantai daratan sekitar 250 – 300 meter. Karakteristik vegetasi hutan pantai hidup pada daerah kering di tepi pantai, tidak terpengaruh iklim, tanah berbatu dan berpasir, serta terletak di atas pasang laut tertinggi.
2. Ekosistem hutan mangrove sebagian besar terdapat di sepanjang Segoro Anakan serta beberapa blok hutan. Hutan mangrove memiliki ciri ekologis yang khas yaitu, hidup dalam air dengan salinitas tinggi, umumnya berada di daerah pasang surut dan berada di atas sebagian bentuk lahan organik dan bentuk lahan marin.
3. Ekosistem hutan dataran rendah merupakan bagian terluas dari Taman Nasional Alas Purwo, yang sebagian besar terdapat di zona inti. Formasi hutan dataran rendah memiliki fungsi hidrologis, ekologis, dan klimatologis. Hutan dataran rendah di Taman Nasional Alas Purwo sebagian besar didominasi oleh bambu.
4. Ekosistem padang savanna merupakan ekosistem buatan seluas 84 ha yang digunakan sebagai tempat pemantauan berbagai jenis satwa. Ekosistem ini berada di padang penggembalaan Sadengan.
5. Ekosistem hutan bambu terdapat di hampir seluruh wilayah taman nasional. Vegetasi hutan bambu penyebarannya cukup luas, karena

⁹ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan, *op.cit.*, hlm. 12.

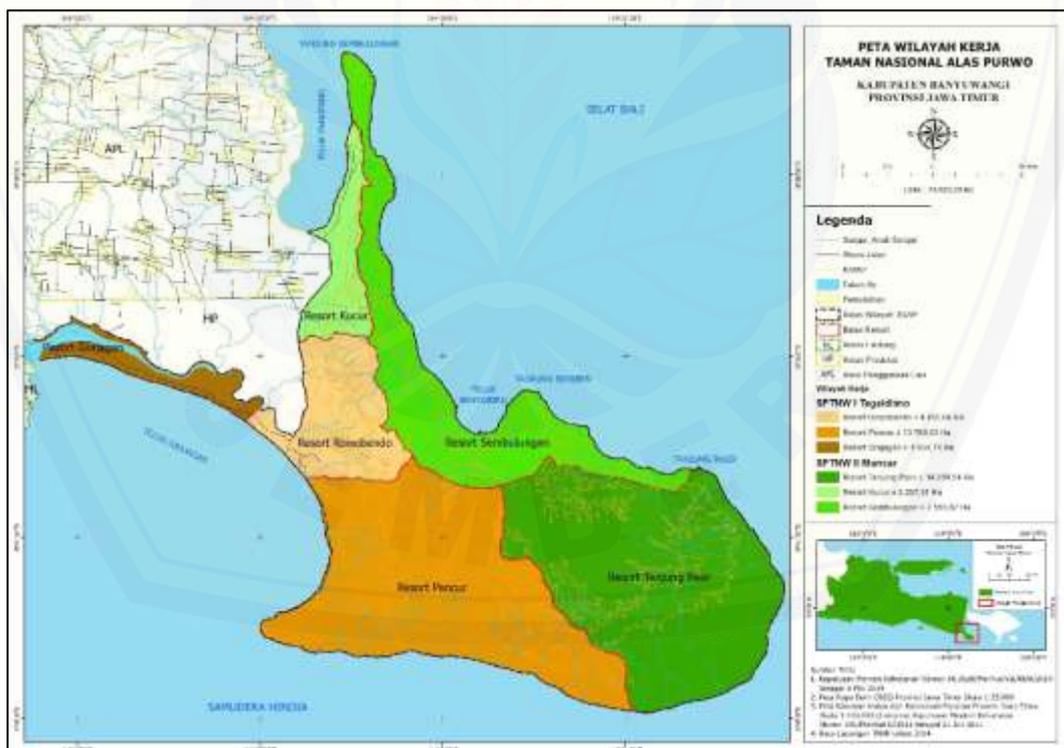
¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dikutip dari Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009* (Jakarta: FWI, 2011), hlm. 1.

mempunyai sebaran yang merata pada hutan pantai maupun hutan hujan dataran rendah.

6. Ekosistem hutan tanaman terdapat di Blok Marengan seluas 1.203 ha. Vegetasinya terdiri dari tanaman jati, mahoni, legaran, akasia, dan sonokeling.¹¹

Keragaman jenis vegetasi darat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo termasuk tinggi. Terdapat lebih dari 700 jenis tumbuhan mulai dari tingkat tumbuhan sawah hingga tumbuhan tingkat pohon dari berbagai formasi vegetasi. Taman Nasional Alas Purwo terbagi atas 2 wilayah kerja yang disebut Seksi Pengelolaan Taman Nasional, yakni Seksi Pengelolaan wilayah 1 di Tegaldlimo dan Seksi Pengelolaan wilayah 2 di Muncar. Seksi-seksi perwakilan tersebut membawahi 6 resort, antara lain Resort Rowobendo, Resort Pancur, Resort Grajagan, Resort Kukur, Resort Sembulungan, dan Resort Tanjung Pasir.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kerja Taman Nasional Alas Purwo



Sumber: Arsip Balai Taman Nasional Alas Purwo tahun 2011.

¹¹ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Induk, *op.cit.*, hlm. 8.

Batas Taman Nasional Alas Purwo sebelah utara meliputi Teluk Pangpang, Selat Bali, Desa Sumberberas, Desa Kedungrejo, Desa Wringinputih, dan Desa Kedungsari. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Batas kawasan di sebelah barat meliputi Teluk Grajagan, hutan negara yang dikelola Perhutani, Desa Grajagan, Desa Purwoagung, dan Desa Sumberasri. Batas di sebelah timur adalah Selat Bali dan Samudera Indonesia.

Batas-batas di wilayah darat meliputi 11 desa yang berada di 3 kecamatan. Desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional Alas Purwo inilah yang disebut desa penyangga. Definisi kawasan penyangga taman nasional adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan taman nasional yang memiliki ekosistem pendukung ekosistem utama di kawasan taman nasional. Zona penyangga atau *Bufferzone* adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area inti dan teridentifikasi, untuk melindungi area inti dari dampak negatif kegiatan manusia. Dimana hanya kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan konservasi yang dapat dilakukan.¹²

Dalam UU No 5 Tahun 1990 pada Penjelasan Pasal 7 menyatakan bahwa perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Perwujudan dari Pasal 7 terdapat dalam Pasal 8 yakni Perlindungan sistem penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengaturan cara pemanfaatannya diatur melalui Peraturan Pemerintah.¹³ Oleh karena itu penetapan kawasan desa penyangga taman nasional dibentuk sebagai upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan yang terdapat di kawasan taman nasional.

Tata guna lahan di desa-desa penyangga merupakan kawasan pedesaan yang terdiri dari pemukiman, areal pertanian (sawah dan ladang), fasilitas umum

¹² Taman Nasional Alas Purwo, Buku Informasi, *op.cit.*, hlm. 4.

¹³ SK Presiden Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990, *op.cit.*, hlm. 5.

(jalan, pemakaman, sarana olahraga, tempat ibadah dan lain-lain), serta hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani (hutan lindung dan hutan produksi).

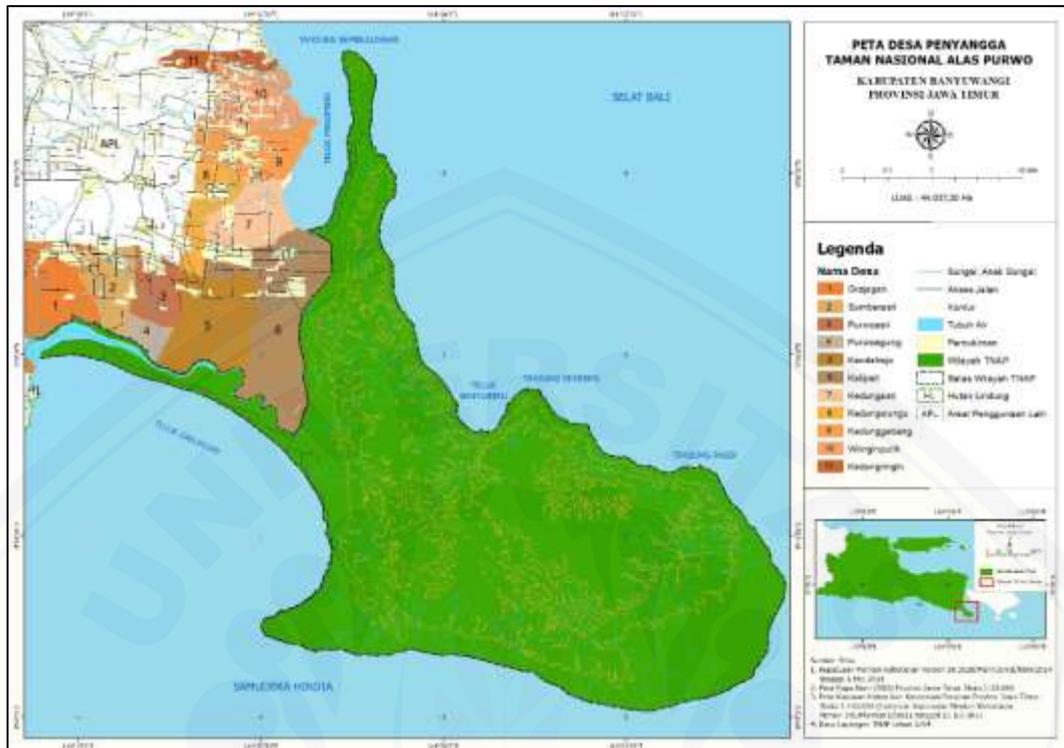
Daerah penyangga memiliki berbagai jenis flora yang spesifik dan unik karena pengaruh ekosistem karst. Flora ekosistem karst memiliki fungsi ekonomis maupun ekologis yang sangat tinggi, baik dalam bentuk herba, perdu, maupun pohon. Potensi fauna sangat beragam, hampir semua kelompok hewan ada di ekosistem karst daerah penyangga, antara lain : mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, moluska, serangga, anthropoda dan invertebrata lain..

Masyarakat yang tinggal di desa-desa penyangga yang terdapat di Kecamatan Tegaldlimo dan Purwoharjo umumnya didominasi oleh masyarakat pendatang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah atau biasa disebut *wong kulonan* dan penduduk asli Banyuwangi atau *wong osing*.¹⁴ Sedangkan desa-desa di daerah pesisir seperti Desa Grajagan dan Wringinputih, umumnya didominasi oleh orang Madura. Warga pendatang *wong kulonan* umumnya lebih banyak bertani dengan bercocok tanam. Penduduk asli Banyuwangi lebih suka berkebun atau berladang, sedangkan orang-orang Madura yang banyak tinggal di pesisir pantai lebih banyak bekerja sebagai nelayan dan berdagang.

Desa-desa di daerah penyangga merupakan desa agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas pertanian yang dihasilkan meliputi tanaman pangan, buah-buahan, dan palawija. Selain itu ditunjang dengan mata pencaharian lainnya seperti berdagang, nelayan dan lain-lain. Kehidupan dan aktifitas masyarakat di daerah penyangga sebagian besar bergantung pada kawasan taman nasional, terutama hasil dari sumber daya hutan yang luas.

¹⁴ *Wong kulonan* merupakan sebutan yang biasa diucapkan masyarakat *Osing* Banyuwangi terhadap komunitas masyarakat pendatang jawa yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah Banyuwangi. *Wong osing* atau *Wong Blambangan* merupakan penduduk asli Banyuwangi yang bertempat tinggal dan menetap sejak zaman Kerajaan Majapahit. Samsubur. *Sejarah Blambangan*. (Denpasar: Paramita, 2011)., hlm. 40.

Gambar 2.3. Peta Desa Penyangga Taman Nasional Alas Purwo



Sumber: Arsip Balai Taman Nasional Alas Purwo tahun 2011.

Sebelas desa penyangga Taman Nasional Alas Purwo antara lain Desa Grajagan dan Sumberasri di Kecamatan Purwoharjo; Desa Kedungsari, Kedunggebang, Kedungwungu, Kalipait, Purwasari, Purwoagung, dan Kendalrejo di Kecamatan Tegaldlimo; Desa Wringinputih dan Kedungringin di Kecamatan Muncar. Dari 11 desa penyangga tersebut 2 desa ditunjuk sebagai Model Desa Konservasi atau MDK pada tahun 2006 yakni Desa Sumberasri dan Kedungsari.¹⁵

Selain Desa Sumberasri dan Kedungsari yang ditetapkan sebagai Model Desa Konservasi atau MDK pada tahun 2006. Pada tahun 2011 Desa Kalipait juga ditetapkan menjadi Model Desa Konservasi, serta pada tahun 2013 menyusul Desa Wringinputih. Keempat desa tersebut terpilih menjadi Model Desa Konservasi karena memiliki beberapa kriteria, antara lain :

1. Seluruh desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi,
2. Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi,

¹⁵ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Induk, *op.cit.*, hlm. 10.

3. Desa yang masyarakatnya miskin, mempunyai pendapatan rendah, dan ketergantungan hidupnya terhadap kawasan konservasi tinggi,
4. Desa yang dapat difungsikan sebagai perlindungan atau dapat melindungi kawasan konservasi dari berbagai gangguan,
5. Desa yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata alam,
6. Desa yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dikembangkan.

Desa Sumberasri ditunjuk menjadi model desa konservasi selain karena memenuhi kriteria tersebut, juga karena memiliki karakteristik bentang alam yang unik. Desa Sumberasri memiliki wilayah pertanian dan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan mangrove dan Segoro Anakan. Karakteristik bentang alam tersebut memiliki potensi wisata yang besar jika dikelola dan dikembangkan.

Potensi yang menjadi daya tarik utama adalah hamparan sawah masyarakat, serta pemandangan alam Hutan Mangrove dan Segoro Anakan. Bentang alam yang dimiliki Desa Sumberasri sangat baik dan mendukung untuk bercocok tanam. Sebabnya desa ini sebagian besar wilayahnya merupakan areal pertanian.

Mayoritas penduduk Desa Sumberasri bermatapencaharian sebagai petani, meskipun wilayahnya berbatasan dengan kawasan pantai. Mencari ikan merupakan pekerjaan sampingan yang hanya digeluti beberapa orang yang memiliki perahu. Begitu pula pencari kayu kering (*rencek*) dilakukan sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa digambarkan jika mayoritas penduduk Desa Sumberasri sangat bergantung pada alam.

Secara administratif Desa Sumberasri berada di Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut; sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Desa Grajagan, sebelah utara berbatasan dengan Glagah Agung, dan sebelah timur berbatasan dengan Purwoasri dan Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo.

Wilayah Desa Sumberasri memiliki topografi dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sebesar 0-32 mdpl dengan rata-rata curah hujan 2000-3000 mm per tahun dan suhu harian antara 27-32° C. Berdasarkan

data demografi tahun 2012 Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, jumlah penduduk Desa Sumberasri 6.325 orang.

Gambar 2.4. Peta Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Arsip Kantor Desa Sumberasri tahun 2012.

Desa Sumberasri memiliki luas wilayah 1.866 ha, terbagi menjadi empat dusun, yakni Dusun Krajan, Sumberejeki, Gebangkandel, dan Blok Solo yang terbagi atas 50 RT dan 15 RW.¹⁶

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2012

No.	Keterangan	2010	2011	2012
1.	Jumlah Laki-laki	3.171	3.187	3.200
2.	Jumlah Perempuan	3.100	3.117	3.125
	Jumlah	6.271	6.304	6.325

Sumber: BPS, Kecamatan Purwoharjo Dalam Angka Tahun 2010, 2011, 2012.

Secara historis Desa Sumberasri merupakan pemekaran dari Desa Grajagan. Wilayah Sumberasri dulunya merupakan hutan belantara dan masih

¹⁶ Kecamatan Purwoharjo Dalam Angka Tahun 2012, hlm. 6.

bernama Purwoasri. Pada tahun 1969 Desa Grajagan dipecah menjadi dua desa yakni Desa Grajagan dan Desa Sumberasri.¹⁷

Mayoritas penduduk Desa Sumberasri bekerja sebagai petani, baik yang memiliki lahan pertanian sendiri atau sebagai buruh tani. Kondisi tersebut tidak lepas dari komoditas utama hasil pertanian di Desa Sumberasri antara lain padi dan kedelai. Selain itu ada pertanian campuran antara lain palawija, buah naga dan jeruk. Sisanya merupakan pertanian yang bersifat musiman.

Tabel 2.2. Penduduk Desa Sumberasri yang Bekerja Menurut Pekerjaan Umum dan Sektor Tahun 2012

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	2.911
2.	Pertambangan	1
3.	Industri	31
4.	Listrik dan Gas	2
5.	Konstruksi Bangunan	30
6.	Perdagangan	207
7.	Hotel dan Rumah Makan	6
8.	Transportasi	14
9.	Informasi dan Komunikasi	3
10.	Keuangan dan Asuransi	14
11.	Jasa Pendidikan	156
12.	Kesehatan	20
13.	Jasa Kemasyarakatan	47
14.	Lain-lain	11
Jumlah		3.453

Sumber: BPS, Kecamatan Purwoharjo Dalam Angka Tahun 2012.

Catatan: penduduk yang dihitung adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas

Sebagian besar wilayah Desa Sumberasri merupakan areal pertanian, meliputi sawah dan ladang. Sebagian lagi merupakan hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani yang didominasi hutan jati dan sisanya merupakan hutan lindung yang ditetapkan sebagai kawasan hutan penyangga taman nasional.

¹⁷ Profil Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, hlm. 2.

Kawasan hutan penyangga ditumbuhi berbagai spesies tumbuhan, antara lain gebang, jati, mahoni, serta mangrove. Kawasan hutan tersebut berbatasan dengan hutan produksi milik Perhutani serta taman nasional. Masyarakat Desa Sumberasri sering menyebut hutan tersebut sebagai Hutan Marengan.¹⁸ Kawasan hutan inilah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan ekosistem utama taman nasional.

Hutan mangrove merupakan ekosistem yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem wilayah pesisir. Hutan mangrove di Taman Nasional Alas Purwo terbagi menjadi beberapa wilayah dengan wilayah terluas adalah di sekitar Sungai Segoro Anakan, Seksi Pengelolaan TN Wilayah I Tegaldlimo. Luasan hutan mangrove di daerah tersebut sekitar 866 ha. Hutan Mangrove juga terdapat di sekitar Teluk Pangpang yang berada di wilayah kerja Seksi Pengelolaan TN Wilayah II Muncar dengan luas sekitar 198 ha. Formasi mangrove juga ditemukan di beberapa silayah lain di TN Alas Purwo, namun luasan formasi mangrove tidak seluas kedua tempat tersebut.

Kondisi habitat mangrove di Taman Nasional Alas Purwo memiliki karakteristik yang berbeda antara satu lokasi dengan lokasi lainnya. Mangrove di sekitar Segoro Anakan tumbuh di bagian utara dan selatan sungai sepanjang kurang lebih 15 km dengan ketebalan 15 m hingga 350 m. Kondisi yang agak berbeda ditemui pada habitat mangrove di sekitar Teluk Pangpang. Pada lokasi ini mangrove hidup di sekeliling teluk dengan gelombang yang tidak terlalu besar. Panjang pantai habitat mangrove di kawasan ini adalah 10 km dengan ketebalan 10 m hingga 600 m.¹⁹

Sebagian besar habitat mangrove berada di Segoro Anakan, kurang lebih terdapat 26 jenis mangrove dari total 27 jenis mangrove yang ada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.²⁰ Jenis mangrove yang dominan di Segoro Anakan

¹⁸ Wawancara dengan Marzuki, Banyuwangi, 9 Agustus 2017.

¹⁹ Taman Nasional Alas Purwo, Seri Buku Informasi dan Potensi Mangrove Taman Nasional Alas Purwo 2011., hlm. 13.

²⁰ Taman Nasional Alas Purwo, Buku Informasi, *op.cit.*, hlm. 11.

yakni *Rhizophora mucronata* Ceriopstagal dan *Bruguiera gymnorrhiza*. Taman Nasional Alas Purwo juga memiliki jenis mangrove yang bersifat langka dan endemik di Indonesia. Jenis mangrove ini secara global bersifat langka yang disebabkan kemungkinan buah mangrove mudah terbawa oleh gelombang dan tumbuh ditempat lain. Terdapat kurang lebih 14 jenis mangrove yang langka di Indonesia, dua diantaranya ditemukan di Taman Nasional Alas Purwo yakni jenis *Ceriops decandra* dan *Scyphiphora hydrophyllacea*.²¹

Keanekaragaman hayati yang kaya di Taman Nasional Alas Purwo menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar taman nasional. Daya tarik ekonomi menjadi faktor utama yang sering jadi alasan masyarakat sekitar masuk ke kawasan taman nasional dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Sebagian besar masyarakat yang hidup di pinggiran kawasan taman nasional termasuk dalam kategori miskin. Sebabnya sumber daya alam yang terdapat di kawasan taman nasional menjadi komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

2.2 Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Mangrove Oleh Masyarakat Sekitar Taman Nasional

Keberlangsungan hidup manusia tidak dapat terlepas dari alam. Alam memiliki pengaruh besar menyediakan sumber dayanya bagi keberlangsungan kehidupan. Taman nasional merupakan kawasan hutan dilindungi yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah menimbulkan masyarakat yang hidup dan tinggal disekitar kawasan saling berinteraksi dengan kawasan ini.

Interaksi masyarakat dengan kawasan konservasi, termasuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo memegang kunci keberlanjutan dan eksistensi dari kawasan konservasi itu sendiri. Interaksi masyarakat dengan taman nasional mempunyai level ketergantungan yang berbeda-beda. Semakin berdekatan dengan kawasan taman nasional, diindikasikan ketergantungan masyarakat semakin tinggi. Bentuk interaksi masyarakat dengan kawasan terjadi dalam berbagai hal.

²¹ Taman Nasional Alas Purwo, Seri Buku Informasi, *op.cit.*, hlm. 24.

Interaksi masyarakat tersebut merupakan wujud dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup serta kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan dan religi.

Daya tarik sumber daya alam yang sangat melimpah dan beragam menjadi penyebab utamanya. Banyak masyarakat di daerah penyangga yang berinteraksi dengan memanfaatkan hasil alam yang ada. Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan TNAP sering dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan karena memiliki manfaat ekonomi, baik flora maupun fauna.²² Flora yang diambil dan dimanfaatkan antara lain bambu, rotan, serta kayu bakar dari berbagai pohon. Adapun fauna yang sering diburu antara lain berbagai jenis burung, kera dan banteng.²³ Perburuan satwa yang cukup tinggi dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, keterampilan yang dimiliki masyarakat juga menjadi pendorongnya sehingga mayoritas masyarakat hanya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara langsung.

Pemanfaatan sumber daya alam hasil laut juga dilakukan masyarakat sekitar kawasan taman nasional. Faktor geografis TNAP yang letaknya sebagian besar dikelilingi oleh laut menjadi potensial. Dalam aktivitasnya, masyarakat melalui kawasan taman nasional sebagai akses terdekat ke perbatasan laut. Hasil laut yang dimanfaatkan antara lain, kerang, cangkang moluska, kepiting dan udang, serta ikan-ikan kecil.²⁴

Interaksi masyarakat dengan kawasan taman nasional tidak hanya sebatas pada pemanfaatan sumber daya alam saja, namun ada interaksi lain yang memanfaatkan kawasan dalam aktivitasnya. Pemanfaatan kawasan tersebut antara lain: kapal sandar, yang memanfaatkan wilayah pantai untuk menambatkan perahu; pendarung (pencari kermis/remis), yang dalam melakukan aktivitasnya selalu melewati kawasan taman nasional untuk menuju bibir pantai; pesanggem, yang mengolah dan menggarap lahan di kawasan eks zona penyangga yang kini

²² Wawancara dengan Suyatno, Banyuwangi, 14 Oktober 2018.

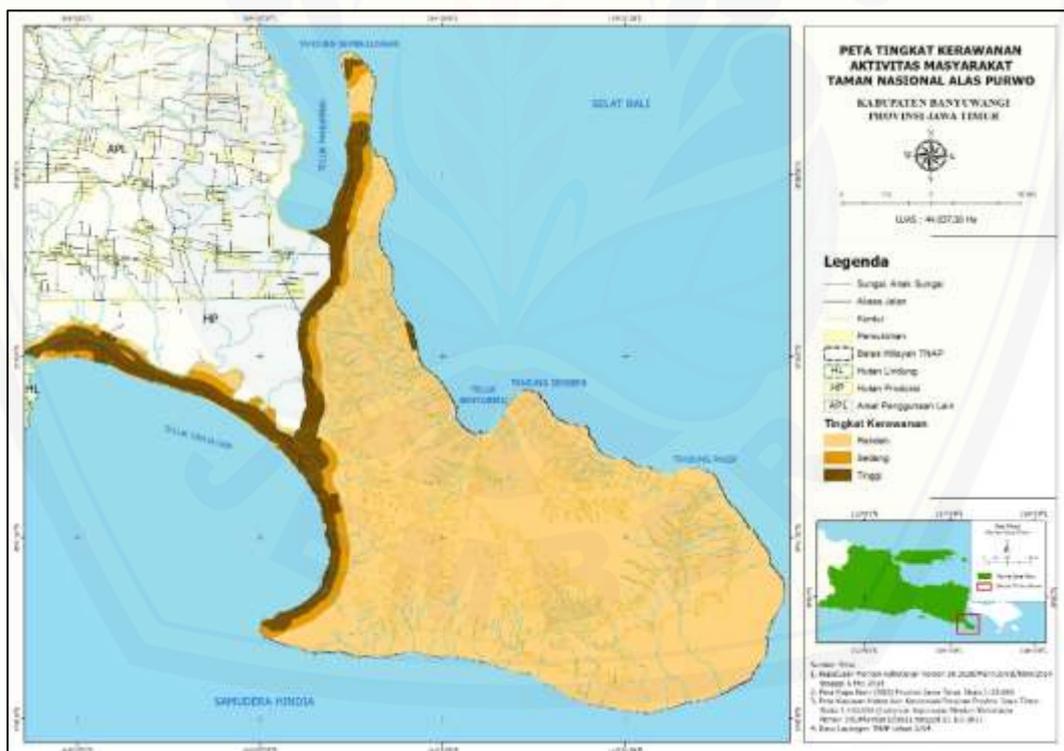
²³ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan, *op.cit.*, hlm. 32.

²⁴ Wawancara dengan Arief, Banyuwangi 9 Agustus 2017.

dimiliki Perum Perhutani; pemancing, yang dalam melakukan aktivitasnya melalui kawasan taman nasional untuk menuju spot pemancingan.²⁵

Interaksi lain masyarakat di kawasan taman nasional yakni kegiatan keagamaan dan spiritual. Bagi masyarakat Hindu di Banyuwangi secara umum, dan masyarakat Hindu di sekitar kawasan taman nasional, Pura Luhur Giri Salaka yang berada di dalam kawasan taman nasional menjadi tempat prosesi peribadatan yang sangat penting. Pura ini berada dalam zona religi sejarah dan budaya BTNAP. Selain itu ada pula tempat untuk kegiatan spiritual yakni antara lain kawasan Pancur, Goa Istana, Goa Mayangoro, Goa Padepokan, Makam Panjang, dan lain sebagainya.²⁶

Gambar 2.5. Peta Tingkat Kerawanan Aktivitas Masyarakat Taman Nasional Alas Purwo



Sumber: Arsip Balai Taman Nasional Alas Purwo tahun 2011.

²⁵ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan, *op.cit.*, hlm. 31.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Sumber daya hutan mangrove yang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo memiliki peranan penting terhadap ekologi serta ekonomi masyarakat sekitar kawasan taman nasional. Peran ekologinya yakni sebagai stabilitas garis pantai, menahan sedimen, perlindungan habitat dan keanekaragaman, produktivitas biomassa, serta sumber plasma nuftah, selain sebagai penyangga kehidupan ekosistem utama taman nasional. Peran ekonominya yakni dimanfaatkan masyarakat sebagai pemenuhan kehidupan sehari-hari dari hasil produk hutan serta produk lainnya.²⁷

Nilai ekonomi hutan mangrove secara garis besar dikelompokkan menjadi dua: yakni nilai penggunaan dan nilai intristik. Nilai penggunaan dibagi lagi menjadi nilai penggunaan langsung dan nilai penggunaan tidak langsung. Seperti contoh *rencek* atau batang dan ranting pohon mangrove yang digunakan sebagai kayu bakar, atau dibuat menjadi arang kayu untuk dijual. Kemudian nilai intristik terbagi menjadi nilai pilihan, nilai warisan, dan nilai keberadaan. Nilai pilihan berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan di masa yang akan datang. Nilai warisan berkaitan dengan kesediaan membayar untuk melindungi manfaat lingkungan bagi generasi yang akan datang, sehingga merupakan potensi penggunaan. Sementara nilai keberadaan muncul karena adanya kepuasan atas keberadaan sumber daya meskipun tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya.²⁸

Desa Sumberasri menjadi salah satu desa di ujung selatan Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan laut, memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah. Lahan pertanian milik masyarakat serta hutan produksi yang dikelola Perhutani yang menjadi kawasan penyangga taman nasional. Potensi sumber daya alam lainnya yakni Segoro Anakan yang merupakan habitat beberapa spesies tumbuhan serta hewan air.

²⁷ Amran Saru. *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 83.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

Kawasan ini masuk dalam wilayah perlindungan BTNAP Seksi Pengelolaan Wilayah 1 Tegaldlimo Resort Grajagan. Setiap tahunnya wilayah Segoro Anakan menjadi habitat sementara spesies burung-burung migran. Hewan air yang terdapat di Segoro Anakan antara lain ikan-ikan kecil, kepiting bakau, udang kecil, serta beberapa spesies kerang. Potensi sumber daya alam yang berlimpah inilah yang dimanfaatkan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Wilayah Segoro Anakan terbagi kedalam zona pemanfaatan dan zona tradisional. Zona pemanfaatan yakni bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya. Zona tradisional merupakan kawasan yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat sekitar kawasan taman nasional yang mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.²⁹ Zona tradisional inilah yang dimanfaatkan masyarakat Desa Sumberasri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti memancing dan menjaring ikan atau mencari kerang.

Desa Sumberasri pada tahun 2012 berpenduduk 6.325 jiwa yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Menurut data yang dimiliki pemerintah desa, 10% dari jumlah total penduduk masih sangat bergantung pada kawasan hutan.³⁰ Ketergantungan masyarakat akan hutan tersebut antara lain kegiatan menebang kayu, mencari kayu reneck, serta perburuan satwa hutan. Sebagian masyarakat juga sangat bergantung pada wilayah perairan Segoro Anakan. Kegiatan yang dilakukan antara lain menjala ikan, memancing, mencari kerang dan udang, serta memanfaatkan kayu mangrove. Ketergantungan masyarakat akan hasil sumber daya alam tersebut tidak terelakkan, apalagi selama menunggu musim panen tiba.

Rata-rata masyarakat yang tinggal di desa-desa di daerah penyangga memiliki ketergantungan dan interaksi yang tinggi dengan kawasan taman nasional. Hal tersebut diindikasikan dengan banyaknya masyarakat desa

²⁹ Taman Nasional Alas Purwo, Buku Informasi, *op.cit.*, hlm. 6.

³⁰ Profil Desa Sumberasri, *op.cit.*, hlm. 4.

penyangga yang memanfaatkan sumber daya hutan sebagai mata pencaharian.³¹ Tingginya intensitas interaksi masyarakat tersebut dapat berdampak positif pada kehidupan ekonomi masyarakat, namun dapat pula berdampak negatif pada keberadaan hutan, terutama hutan konservasi.

Relasi antara masyarakat dan taman nasional yang terjalin mempunyai dampak yang baik dan kurang baik. Keberadaan sumber daya alam memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun disisi lain menimbulkan persoalan baru dalam hal konservasi alam. Sebagian masyarakat sangat pragmatis mengejar keuntungan ekonomi, sehingga berakibat adanya pengambilan sumber daya alam secara sembarangan dan cenderung melanggar aturan. Hal tersebut terjadi karena kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dari sebagian masyarakat akan pentingnya kelestarian yang kurang. Masyarakat sekitar hanya tahu memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa merawat dan menjaga kelestariannya.

Hutan menjadi bagian penting keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar kawasan taman nasional. Sumber dayanya dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun pemanfaatan yang berlebihan tanpa menjaga kelestarian mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Pembalakan liar dan pencurian kayu sering terjadi dan mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Bukan hanya masyarakat sekitar kawasan taman nasional saja yang memanfaatkan sumber daya hutan, namun masyarakat dari beberapa desa lain. Pembalakan dan pencurian kayu yang terjadi di kawasan Taman Nasional Alas Purwo dan Perhutani terjadi secara masif. Tindakan pencegahan dilakukan pihak BTNAP dan Perhutani melalui patroli hutan, namun pencurian kayu masih saja terjadi.³²

Patroli polisi hutan sering dilakukan menyusuri sebagian kawasan taman nasional baik di zona rimba maupun zona inti. Hanya bekas dan sisa-sisa

³¹ Wawancara dengan Suyatno, Banyuwangi, 14 Oktober 2018.

³² Anonim, "Petugas Tidak Akan Mentolerir Penjarah Hutan" dalam *Radat Banyuwangi*, 26 Februari 2000, hlm. 1.

pembalakan liar yang ditemukan tanpa ada dalangnya.³³ Kesadaran masyarakat sekitar kawasan taman nasional akan pentingnya menjaga kelestarian hutan cenderung sangat minim. Hal ini diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rata-rata rendah.

Sumber mata pencaharian bertani serta berkebun sangat bergantung dengan kondisi musim, tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya sebagian masyarakat mengambil kayu untuk dijual, baik kayu recek serta kayu pohon yang telah tumbang. Sebagian lagi masyarakat yang nakal dan oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan akses keluar masuk taman nasional melakukan pencurian kayu yang memiliki nilai jual tinggi.³⁴

Jenis kayu yang kerap kali dicuri antara lain jati (*Tectona grandis*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), akasia (*Acacia auriculiformis*), sonokeling (*Dalbergia latifolia*). Lokasi pembalakan liar sering ditemukan di Blok Hutan Marengan, yakni kawasan zona rimba yang berada di Resort Grajagan.³⁵ Kawasan ini bukan merupakan zona pemanfaatan atau zona tradisional, yang sejatinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan taman nasional. Sampai dengan tahun 2007 pencurian kayu di Hutan Marengan masih sering terjadi, meskipun tidak semasif pada tahun 2000-an. Belasan hingga puluhan pohon yang sebetulnya tidak boleh ditebang raib hanya tersisa bagian akar dan ranting yang ditinggalkan.

Perburuan satwa juga sering terjadi dengan ditemukannya perangkap satwa. Satwa yang menjadi sasaran antara lain kera, kucing hutan, berbagai jenis burung, serta biawak. Pihak BTNAP sering melakukan penyuluhan ke desa-desa sekitar kawasan taman nasional mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.³⁶ Sebelum kawasan tersebut diresmikan menjadi taman nasional, penduduk disekitar kawasan masih sangat sedikit. Kerapatan hutan serta ekosistemnya

³³ Wawancara dengan Mardzuki, Banyuwangi, 9 Agustus 2017.

³⁴ Wawancara dengan Rohman Sugiarto, Banyuwangi, 10 November 2016.

³⁵ Wawancara dengan Sulaiman, Banyuwangi, 9 Agustus 2017.

³⁶ Wawancara dengan Arief, Banyuwangi 9 Agustus 2017.

terjaga dengan baik karena masih sangat sedikitnya masyarakat yang berinteraksi langsung dengan kawasan tersebut.

2.3 Kerusakan Hutan Mangrove di Blok Bedul

Kerusakan hutan di Indonesia sudah terjadi sejak era kolonialisme. Alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman dan perkebunan besar-besaran menjadi awal berkurangnya kawasan hutan. Selain kawasan hutan di dataran tinggi maupun rendah, kawasan hutan pesisir juga mengalami kerusakan. Luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120 juta ha, namun sebagian luasan hutan tersebut mengalami degradasi dan deforestasi hingga menyisakan hanya sekitar 75% atau 90 juta ha. Greenpeace menyebutkan bahwa Indonesia telah kehilangan lebih 72% dari wilayah hutan alam utuhnya dan 40% dari tutupan hutannya sama sekali hancur. Laju kerusakan hutan Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Dalam periode tahun 2000-2005, laju kerusakan hutan diperkirakan antara 1,9 juta sampai 2,8 juta ha, mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 41 triliun setiap tahunnya.³⁷

Data berbeda disebutkan Forest Watch Indonesia yang menaksir laju *deforestasi* Indonesia periode tahun 1985-2009. Rentang tahun 1985-1997 deforestasi di 5 pulau besar Indonesia mencapai 1,8 juta ha per tahun. Pada rentang tahun 1997-2000 angka ini melonjak menjadi 2,84 juta ha per tahun untuk seluruh wilayah Indonesia. Hasil analisis terbaru FWI, angka laju deforestasi menurun menjadi 1,51 juta ha per tahun pada rentang 2000-2009.³⁸ Jumlah tersebut bukan hanya kerusakan yang terjadi pada hutan tropis saja, melainkan juga mencakup kerusakan hutan mangrove di Indonesia.

Kerusakan kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo dan Perhutani merupakan akibat dari ketergantungan masyarakat sekitar kawasan akan hasil sumber daya hutan. Hal tersebut disebabkan kondisi kehidupan masyarakat sekitar

³⁷ Lihat Greenpeace, April 2006, Lembar Kejahatan Hutan, <https://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2006/5/kayu-lapis-indonesia.pdf>, diakses pada 7 Juni 2018.

³⁸ Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2000-2009* (Jakarta: FWI, 2011), hlm. 20.

kawasan taman nasional dan Perhutani yang relatif miskin dan sangat bergantung dengan alam. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat sekitar kawasan taman nasional semakin sulit. Hasil hutan terutama kayu menjadi alternatif masyarakat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, baik digunakan sendiri atau dijual.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2000 kerusakan kawasan hutan semakin parah. Pernyataan Gus Dur “Hutan untuk Rakyat”³⁹ dipelintir oknum tidak bertanggungjawab, menjadi penyebab bagi masyarakat untuk mengambil hasil hutan untuk dimanfaatkan.

Kerusakan lingkungan hidup baik hutan maupun biota laut di Banyuwangi dinilai sangat parah pada tahun 2000. LSM Pecari yang merupakan lembaga swadaya dalam bidang lingkungan hidup merasa prihatin akan kondisi kerusakan lingkungan hidup di Banyuwangi. Dalam peringatan Hari Bumi, LSM Pecari mengajak masyarakat untuk menyayangi bumi. Aktivis Pecari Yudhi Prasetyo mengatakan, perusakan hutan dan laut di Banyuwangi saat ini dilakukan semena-mena. Para perusak mengesampingkan budaya malu dan patuh pada aturan hukum. Kerusakan hutan di Banyuwangi selatan saja diperkirakan mencapai 2.300 hektar, baik hutan milik negara di kawasan taman nasional dan perhutani, juga hutan perkebunan.⁴⁰ Jumlah tersebut belum ditambah dengan kerusakan kawasan hutan yang berada di Banyuwangi Barat dan Utara. Kerusakan kawasan hutan tersebut akibat dari penjarahan kayu yang dilakukan masyarakat.

Tidak hanya kawasan hutan yang mengalami kerusakan, kawasan pesisir dan laut pun mengalami kerusakan. Sebagian besar kerusakan yang terdapat di laut merupakan kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebabkan oknum nelayan nakal yang menggunakan potasium dan dinamit untuk mencari ikan. Kawasan pesisir dan laut selain terdapat habitat terumbu karang, di kawasan pesisir muara juga terdapat ekosistem hutan mangrove yang didominasi tumbuhan

³⁹ <http://www.gusdurian.net/id/sosok/Pendekar-Konservasi-Gunung-Lemongan>, diakses pada 7 Juni 2018.

⁴⁰ Anonim, “Parah, Tingkat Kerusakan Hutan Banyuwangi” dalam *Radar Banyuwangi*, 20 Februari 2000, hlm. 3.

bakau. Hutan mangrove di Banyuwangi sebagian besar tumbuh di kawasan Taman Nasional Alas Purwo bagian selatan dan timur, serta sebagian kecil berada di kawasan timur Banyuwangi.

Kementerian Kehutanan pada 2007, melalui Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan mengeluarkan data hutan mangrove Indonesia, luasnya mencapai 7.758.410,595 hektar, tetapi hampir 70% di antaranya mengalami kerusakan.⁴¹ Kerusakan hutan mangrove tersebut disebabkan berbagai faktor, baik alami maupun karena ulah manusia. Pembangunan di sektor industri, pemukiman, pembangunan pariwisata serta perkotaan menyumbang kerusakan terbanyak.

Data terbaru tahun 2009 yang dirilis BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) menyebut bahwa luas hutan mangrove di Indonesia tersisa 3,2 juta ha. Data dari BAKOSURTANAL menggunakan pendekatan penginderaan jauh, yaitu analisis citra Satelit Landsat yang direkam antara tahun 2006-2009 dan ditambah dengan data referensi terbaru dari setiap sumber data.⁴²

Hutan mangrove secara khusus sangat menarik dilihat dari segi ilmiah karena memiliki struktur dan fisiologis yang sesuai pada berbagai faktor habitatnya. Hutan mangrove penting dari segi ekologis karena peranannya dalam reklamasi tanah yang berasal dari laut. Mangrove menjadi tempat berpijah beberapa jenis ikan serta makhluk hidup air. Kerusakan ekosistem mangrove akan berdampak sangat luas bagi kehidupan ikan serta makhluk air lainnya. Kemudian berdampak pula pada masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove.⁴³

Ekosistem mangrove di Segoro Anakan, Resort Grajagan mengalami kerusakan akibat degradasi lahan, penebangan serta penurunan kualitas tanah.

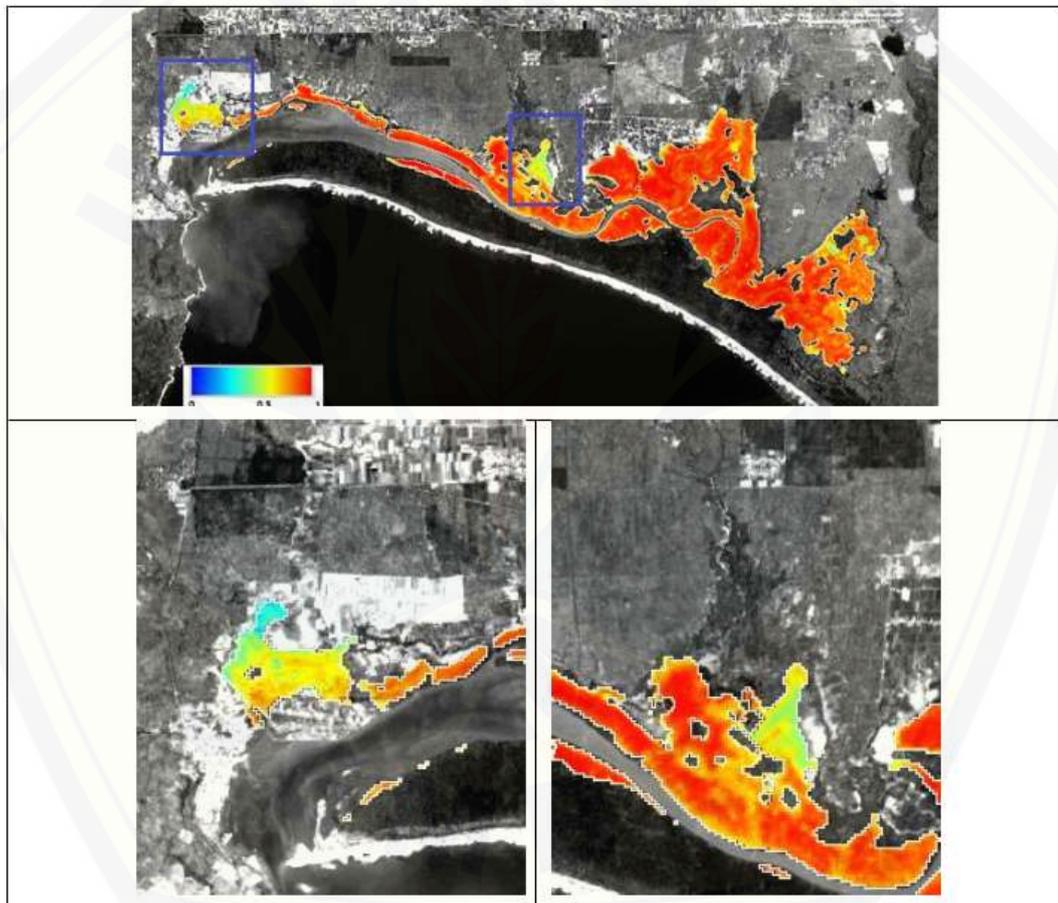
⁴¹ M. Gufron H. Kordi K, *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 44.

⁴² *Ibid.*, hlm. 44.

⁴³ Ewusie, J.Y. Pengantar: Ekologi Tropika. Terjemahan Usman Tanuwidjaja. (Bandung: Penerbit ITB, 1990), hlm. 285.

Seperti tampak pada gambar 2.6 yang merupakan data hasil penginderaan jauh dari citra Satelit Landsat, yang menggambarkan citra ekosistem mangrove di Resort Grajagan, Taman Nasional Alas Purwo.⁴⁴ Area yang ditandai bingkai biru merupakan ekosistem mangrove yang mengalami degradasi akibat penebangan serta penurunan kualitas tanah.

Gambar 2.6. Citra Satelit Landsat Ekosistem Mangrove di Segara Anakan Resort Grajagan Taman Nasional Alas Purwo



Sumber: *Jurnal PORSEC* Tahun 2014.

⁴⁴ Gathot Winarso dkk. New Mangrove Index as Degradation/Health Indicator Using Remote Sensing Data : Segara Anakan and Alas Purwo Case Study. *Jurnal. PORSEC* 2014. Bali. 2014., hlm. 310-311.

Luas kawasan mangrove yang mengalami kerusakan akibat penebangan serta penurunan kualitas tanah kurang dari 5 ha.⁴⁵ Wilayah tersebut sebenarnya mengalami kerusakan akibat penurunan kualitas tanah terlebih dahulu. Mangrove yang sebelumnya tumbuh menjadi mati, dan mangrove yang baru ditanam mengalami gagal tumbuh. Kemudian masyarakat sekitar mengambil dan menebang pohon-pohon bakau yang sebagian telah mati tersebut. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan taman nasional. Penurunan kualitas tanah di kawasan tersebut diindikasikan terjadi akibat kekeringan dan tidak adanya daerah aliran air, serta lokasinya berdekatan dengan hutan milik Perhutani yang didominasi oleh tanaman jati.

Dinamika luasan tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan interpretasi citra satelit Landsat pada tahun 1989, 1995, 1997, 2004, dan 2006 terhadap penutupan lahan kawasan Taman Nasional Alas Purwo, terjadi dinamika penutupan lahan dari waktu ke waktu,⁴⁶ seperti dalam tabel 3.4.

Tabel 2.3 Dinamika Luasan tutupan lahan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Tahun 1989, 1995, 1997, 2004, dan 2006

Kelas Tutupan Lahan	Tahun				
	1989	1995	1997	2004	2006
Bambu	7608.39	7652.38	7703.6	7714.48	7767.73
Hutan dataran rendah	32703.74	32642.46	32591.24	32627.97	32576.98
Hutan pantai	79.63	79.63	79.63	79.63	79.63
Hutan tanaman	4214.9	4321.59	4514.27	4409.11	4460.29
Mangrove	2267.23	2128.48	1985.15	1783.54	1775.41
Padang rumput (Savana)	76.66	126.01	76.66	54.27	56.82
Segoro Anakan	477.09	477.09	477.09	477.09	477.09
Tegalan	47.86	47.86	47.86	329.99	282.13

Sumber: Arsip Taman Nasional Alas Purwo tahun 2011.

⁴⁵ Wawancara dengan Marzuki, Banyuwangi, 9 Agustus 2017.

⁴⁶ Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan, *op.cit.*, hlm. 57.

Berdasarkan data tabel di atas, sejak tahun 1989 sampai tahun 2006, luasan tutupan ekosistem mangrove di kawasan Taman Nasional Alas Purwo mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor kerusakan, baik faktor alami akibat penurunan kualitas tanah serta perubahan iklim yang menyebabkan mangrove gagal tumbuh serta mati, atau akibat penebangan dan pencurian kayu serta alih fungsi lahan.

Selain kerusakan kawasan hutan mangrove yang terdapat dalam citra satelit Landsat. Sebagian kerusakan kawasan hutan di Taman Nasional Alas Purwo belum dapat dipetakan mengingat penebangan liar terjadi secara menyebar diberbagai lokasi. Bekas dan sisa-sisa penebangan antara lokasi satu dengan yang lain berjauhan.

Jika keadaan seperti ini berlanjut terus menerus maka akibat yang ditimbulkan sangat besar, demikian pula kawasan hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove dapat menimbulkan peningkatan laju intrusi air laut ke arah daratan.⁴⁷ Laju intrusi air laut ke arah daratan terjadi di kawasan yang sangat minim bahkan tidak adanya vegetasi mangrove sebagai pengalang dan penyerap kadar salinitas air laut.

Dalam jurnal PORSEC, Gatot Winarso melalui rekam data citra satelit landsat menyebutkan pola citra indeks mangrove di kawasan Taman Nasional Alas Purwo dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun terdapat sedikit area degradasi berwarna kuning serta hijau kebiruan.⁴⁸ Lihat Gambar 2.6. Area degradasi tersebut sangat kecil diukur bila dibandingkan dengan luas keseluruhan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.

Area degradasi dari citra satelit tersebut terbaca sebagai kawasan vegetasi mangrove yang didominasi oleh mangrove minor yakni komunitas mangrove berukuran kecil dengan kerapatan mangrove yang jarang. Sisanya sebagian kawasan yang berwarna biru merupakan kawasan mangrove yang mengalami

⁴⁷ Amran Saru. *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 63.

⁴⁸ Gathot Winarso dkk. *op.cit.*, hlm. 312.

kerusakan, baik gagal tumbuh atau sudah mati akibat menurunnya kualitas tanah serta perubahan iklim, atau karena ditebang oleh masyarakat.

Ekosistem hutan mangrove yang mengalami kerusakan tersebut berada di pinggiran kawasan taman nasional, yakni berbatasan dengan wilayah pengelolaan Perhutani serta berbatasan dengan pemukiman masyarakat. Sebagian pohon mangrove yang telah mati banyak dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai renek. Sebagian lagi dibiarkan mati karena kondisi tanah yang tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman mangrove.

Kerusakan hutan mangrove di kawasan konservasi Taman Nasional Alas Purwo disimpulkan sebagai kerusakan akibat faktor alami. Konservasi hutan mangrove di kawasan tersebut kemudian dilakukan dengan berbagai tahapan. Tujuannya selain upaya mengembalikan kelestarian hutan kawasan konservasi juga sebagai objek daya tarik wisata. Objek wisata yang dikembangkan merupakan ekowisata, dengan tujuan mengalihkan kegiatan masyarakat sekitar kawasan taman nasional yang sebelumnya merusak menjadi mengelola dan menjaga kelestarian kawasan hutan melalui pariwisata.

Kerusakan kawasan hutan yang berada di dalam zona inti maupun rimba diharapkan dapat berhenti dengan adanya objek wisata yang dikembangkan. Pencurian kayu serta perburuan satwa dicegah dan dihentikan melalui pengembangan ekowisata tersebut. Semakin ramainya kunjungan wisata di kawasan ekowisata mangrove diharapkan mampu mengurangi atau menghentikan interaksi masyarakat sekitar kawasan yang merugikan. Kerusakan kawasan hutan tidak semakin parah serta perlindungan kelestarian kawasan Taman Nasional Alas Purwo dapat dijaga dalam upaya konservasi.

BAB 4

KESIMPULAN

Sebelum menjadi ekowisata, kawasan Bedul hanya merupakan kawasan hutan mangrove yang sekelilingnya terdapat pemukiman warga nelayan. Pada tahun 1997 ketika krisis moneter melanda Indonesia, Bedul yang merupakan kawasan hutan taman nasional dan perhutani menjadi sasaran pencurian dan penjarahan kayu. Pada tahun 2000an ide pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata muncul atas inisiatif Kepala Desa Sumberasri. Tujuannya memanfaatkan dan mengelola potensi kawasan Bedul untuk mengangkat nama Desa Sumberasri serta mengalihkan kebiasaan masyarakat mengambil sumber daya hutan di taman nasional. Kawasan hutan memiliki arti penting bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan terutama di kawasan penyangga taman nasional. Hutan menyediakan sumber daya hayati yang melimpah untuk dimanfaatkan guna mencukupi kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat memasuki kawasan hutan dengan berbagai tujuan, ada yang mengambil kayu, mencari rumput untuk pakan ternak, mencari reneck, serta mengambil hasil hutan lainnya. Aktivitas interaksi masyarakat dengan hutan intensitasnya sangat tinggi dari tahun ke tahun dan terjadi sejak lama dan masih terus terjadi hingga saat ini. Keberadaan masyarakat di daerah sekitar kawasan hutan sejatinya dapat memberikan ancaman serta dampak bagi ekosistem kawasan hutan, namun dapat pula memberikan pengaruh baik bila merujuk pada upaya konservasi.

Pada tahun 2002 jalan menuju Bedul tembus sebagai wujud keseriusan Pemerintah Desa Sumberasri untuk mengelola kawasan Bedul menjadi objek wisata. Kawasan Bedul dipilih karena memiliki potensi yang besar jika dikelola menjadi objek wisata. Pengelolaan kawasan Bedul tersebut memiliki tujuan utama yakni, ingin mengalihkan mata pencaharian masyarakat kawasan pinggiran hutan yang sebelumnya sangat bergantung dengan hutan. Mengurangi ketergantungan masyarakat yang sifatnya merusak hutan menjadi melindungi dan melestarikan hutan.

Di dalam prosesnya, pembangunan berbagai fasilitas penunjang wisata dikerjakan bersama dengan masyarakat. Pelebaran akses jalan, pembangunan dermaga, loket informasi, gazebo, mushola, MCK, warung, lahan parkir serta relokasi rumah-rumah warga di Bedul dikerjakan oleh masyarakat. Ikut sertanya masyarakat dalam proses pengembangan dan pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata, memberikan peran positif dalam perubahan pola kehidupan masyarakat sekitar kawasan Bedul. Pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan menjadi berubah, yang tadinya semena-mena dalam memanfaatkan hasil hutan menjadi merawat dan melestarikan.

Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan yang meliputi beberapa desa penyangga taman nasional dimaksudkan agar masyarakat dapat lepas dari ketergantungan terhadap hasil hutan. Masyarakat diikutsertakan dalam proses pengembangan dan pengelolaan ekowisata selain untuk mengedukasi, juga untuk mengalihkan mata pencaharian mereka. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya sangat bergantung pada hasil hutan, dialihkan pada kegiatan usaha lain dalam sektor pariwisata.

Konsep gagasan dari pemerintah Desa Sumberasri dalam pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata mendapat respon positif dari TNAP. Tahun 2006 Desa Sumberasri ditetapkan menjadi salah satu Model Desa Konservasi (MDK) sebagai wujud apresiasi atas ide dan gagasan pengelolaan kawasan Bedul. Langkah sepihak Pemerintah Desa Sumberasri yang diinisiasi oleh Kepala Desa Bapak Suyatno menarik perhatian Balai Taman Nasional Alas Purwo untuk lebih memperhatikan kawasan penyangga taman nasional. Penunjukan sebagai Model

Desa Konservasi tersebut memiliki program utama yakni menggandeng masyarakat setempat dalam pengelolaan kawasan taman nasional mewujudkan upaya konservasi.

MoU antara Desa Sumberasri dan Balai Taman Nasional Alas Purwo terjalin pada tahun 2007 melalui Surat Perjanjian Kerjasama nomor S.328/TV-T.18/Kons/2007. MoU tersebut berisi kesepakatan kerjasama untuk mengelola kawasan Bedul menjadi objek wisata terbatas. JICA merupakan lembaga swadaya yang turut mempercepat proses pengembangan ekowisata mangrove Blok Bedul. Bedul dipilih sebagai lokasi binaan JICA di Pulau Jawa, karena ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan ini masih tergolong utuh. Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul (BPEMBB) resmi terbentuk dan disahkan oleh kepala desa melalui SK Kepala Desa Sumberasri Nomor 188/05/2008 pada 29 Oktober 2008.

Awal tahun 2009 JICA mulai mengadakan pelatihan untuk pengurus dan pengelola selama 1 tahun. Fokus pelatihan untuk pengurus dan pengelola yakni manajemen dan pengelolaan ekowisata. Pelatihan bahasa Inggris untuk guide serta pelayanan terhadap wisatawan dan pengenalan mengenai mangrove baik jenis-jenis dan ekosistem mangrove. Pengelolaan ekowisata kolaborasi Desa Sumberasri bersama TNAP dan JICA terfokus pada pengelolaan wisata yang berwawasan lingkungan, dengan mengacu pada kaidah konservasi.

Ekowisata merupakan pengertian kompleks dari wisata alam yang lebih menekankan pada upaya tujuan konservasi dalam kegiatan pariwisatanya. Konservasi menjadi agenda penting untuk merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan, baik akibat ulah manusia maupun karena perubahan iklim serta kualitas tanah di kawasan TNAP. Kawasan yang dikelola sebagai wisata terbatas di Bedul meliputi area daratan serta perairan mencapai 200 ha. Kawasan tersebut meliputi wilayah pengelolaan Perhutani dan TNAP.

Penghargaan sebagai The Best Commitment Ecotourism dalam kategori pengelolaan wisata berbasis masyarakat berhasil disabet Ekowisata Mangrove Blok Bedul pada tahun 2009. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Desa Sumberasri. Citra masyarakat pinggiran hutan

yang sebelumnya memiliki ketergantungan akan hasil sumber daya hutan, berubah menjadi masyarakat yang mengelola potensi dan melestarikan kawasan hutan.

Upaya konservasi kawasan hutan mangrove melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul terus berjalan seiring dibukanya objek wisata tersebut. Resmi dibuka oleh Bupati Banyuwangi pada tahun 2010, Ekowisata Mangrove Blok Bedul mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Kedatangan wisatawan lokal dari berbagai daerah maupun wisatawan asing dari berbagai negara memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Ekowisata Mangrove Blok Bedul selain menjadi objek wisata, juga menjadi laboratorium alam bagi para peneliti, sebagai sarana edukasi bagi wisatawan yang datang.

Kerjasama Pemerintah Desa Sumberasri dengan Taman Nasional Alas Purwo berakhir pada tahun 2012, dan berganti status menjadi ijin usaha penyedia jasa wisata alam, dalam hal tersebut ekowisata. Upaya konservasi kawasan hutan mangrove terus berlangsung bersama kegiatan wisata. Rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang gundul dengan penanaman mangrove muda terus dilakukan TNAP bersama masyarakat kawasan Bedul, juga bersama relawan, serta wisatawan yang memiliki minat besar pada kelestarian alam.

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Blok Bedul sebagai upaya konservasi kawasan hutan mangrove di TNAP memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Desa Sumberasri. Dampak terbesar yang dirasakan masyarakat utamanya merupakan dampak sosial ekonomi. Pendapatan masyarakat beralih dari memanfaatkan hasil hutan, menjadi mengelola dan melestarikan hutan dalam bentuk pariwisata. Masyarakat yang dulunya sering mencuri kayu dan memanfaatkan hasil hutan, beralih menjadi pengelola yang turut serta mengembangkan ekowisata. Penghasilan masyarakat yang dulunya berasal dari sektor pertanian, mendapat penghasilan lain dari adanya ekowisata seperti membuka warung atau menyediakan homestay untuk wisatawan. Adanya Ekowisata Mangrove Blok Bedul memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sumberasri. Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta pada upaya pelestarian dan perlindungan kawasan Taman Nasional Alas Purwo.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Arsip

Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul, "Profil Wisata Mangrove Blok Bedul" Banyuwangi: BUMDES Desa Sumpersari, 2010.

Profil Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012.

SK Bupati Kabupaten Banyuwangi, Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2002 tentang Usaha Pariwisata.

SK Presiden Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Taman Nasional Alas Purwo, "Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Taman Nasional Alas Purwo Periode Tahun 2015-2019" Banyuwangi: BTNAP, 2014.

Taman Nasional Alas Purwo, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo Periode 2016-2025" Banyuwangi: BTNAP, 2015.

2. Sumber Buku

Alikodra, Hadi, et.al. *Global Warming: Banjir dan Tragedi Pembalakan Hutan*. Bandung: Nuansa, 2008.

Budhisantoso. *Pariwisata Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Budaya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980.

Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Daldjoeni N. dan A. Suyitno. *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*. Bandung: P.T. Alumni, 2004.

Departemen Pendidikan dan Budaya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan. *35 tahun Penghijauan di Indonesia*. Jakarta: Presidium Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam.

- Dwi Susilo, Rachmad K. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ewusie, J.Y. *Pengantar: Ekologi Tropika* (terjemahan Usman Tanuwidjaja), Bandung: Penerbit ITB, 1990.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (terjemahan Nugroho Notosusanto), Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Hakim, Lukman. *Dasar-dasar Ekowisata*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Harahab, Nurdin. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Hardjodarsono, H.M. Soenarjo. *Sejarah Kehutanan Indonesia I: Periode Pra Sejarah – Tahun 1942*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI, 1986.
- _____. *Sejarah Kehutanan Indonesia II-III: Periode Tahun 1942 – 1983*. Jakarta: Departemen Kehutanan RI, 1986.
- Haryono, A Hari. *Kepariwisata*. Jakarta: Grasindo, 1997.
- Hermawan, M.T. Tri., dkk. *Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hidayat, Herman. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Indriyanto. *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- Kodhyat, Hari. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 1996.
- Kordi, K.M.G.H.. *Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi, dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- _____. *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Neolaka, Amor. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nugroho, Iwan. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nontji, Anugerah. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan, 1987.

- Mangunjaya, Fachruddin M. *Hidup Harmoni dengan Alam: Esai-esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Muhtadi, Rangkuti Ahmad, dkk. *Ekosistem Pesisir dan Laut Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Pitana, I Gede, dan Gayatri, Putu G. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005.
- Pranoto, Suhartono W. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purwowibowo, dan Akhmad Nulhaqim, Soni. *Hutan Mangrove Pasar Banggi Rembang*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Samsubur. *Sejarah Blambangan*. Denpasar: Paramita, 2011.
- Saru, Amran. *Potensi Ekologis dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Wilayah Pesisir*. Bogor: IPB Press, 2014.
- Sasmita, Nurhadi., dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Yogyakarta: Lembah Manah, 2012.
- Siburian, Robert, dan Haba, John. (Ed). *Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sonny Keraf, A. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Sudarmadji. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jember: Universitas Jember Press, 2004.
- Taman Nasional Alas Purwo. *Buku Informasi Balai Taman Nasional Alas Purwo*. Banyuwangi: BTNAP, 2011.
- Taman Nasional Alas Purwo. *Buku Informasi dan Potensi Mangrove Taman Nasional Alas Purwo*. Banyuwangi: BTNAP, 2011.
- Van Steenis, Dr. C.G.G.J. *Flora* (terjemahan Moeso Surjowinoto dkk), Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1975.
- Zen, M.T. (Ed). *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia, 1982.

3. Sumber Jurnal, Laporan, dan Media Cetak

Aipasa, Marlon. “Rehabilitasi Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal FRONTIR Universitas Mulawarman*, Vol.18, No.1, 2004.

Gathot Winarso dkk. “New Mangrove Index as Degradation/Health Indicator Using Remote Sensing Data : Segara Anakan and Alas Purwo Case Study”, *Jurnal. PORSEC 2014*. Bali. 2014.

Gunarto “Konservasi Mangrove Sebagai Pendukung Sumber Hayati Perikanan Pantai”, *Jurnal Litbang Pertanian*, Vol.23, No.1, 2004.

Isprasetyoningsih. “Peranan Ekosistem Mangrove, Pelindung Alami Bahaya Tsunami”, *Jurnal Saintika*, Vol. 6, No. 2, 2005.

Saifullah dan Nurdin Harahap “Strategi Pengembangan Wisata Mangrove di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur”, *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol.1, No.2, 2013.

Soedigdo, Doddy dan Yesser Priono “Peran Ekowisata Dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Pada Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Tangkiling Kalimantan Tengah”, *Jurnal Perspektif Arsitektur*, Vol.8, No.2, 2013.

Sudarmadji “Rehabilitasi Hutan Mangrove”, *Diktat*. Jember: Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember, 2002.

4. Sumber Internet

<http://fwi.or.id/dibalik-kerusakan-hutan-indonesia/>, diakses pada 15 Agustus 2018.

<https://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/report/2006/5/kayu-lapis-indonesia.pdf>, diakses pada 13 Agustus 2018.

<http://mangrovebedul.blogspot.co.id/2009/07/wisata-mangrove-blok-bedul-taman.html>, diakses pada 1 Oktober 2016.

<http://www.scribd.com//Konsep-Ekowisata>, diakses pada 3 November 2016.

<https://travel.tempo.co/read/407289/wisata-mangrove-banyuwangi-percontohan-nasional>, diakses pada 4 Oktober 2016.

5. Sumber Skripsi

Arifal Fahad, Hisyam “Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2013”, *Skripsi*. Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, 2016.

Finta Sanjaya, Endrik “Relasi Antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Deskriptif di Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi)”, *Skripsi*. Jember: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2013.

Yandhi Febriyanti, Dwi, “Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi”, *Skripsi*. Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, 2007.

6. Sumber Wawancara

Eko Kurniawan, Ketua BPEMBB tahun 2008, Banyuwangi, 10-11-2015.

M. Riadi, Pramuwisata, Banyuwangi, 06-10-2016.

Rohman Sugiarto, Ketua BPEMBB tahun 2016, Banyuwangi, 10-11-2016.

Sukadiyanto, Kepala Desa Sumberasri, Banyuwangi, 06-10-2016.

Marzuki, Polisi Hutan BTNAP, Banyuwangi, 09-08-2017.

Retna, Pramuwisata, Banyuwangi 09-08-2017.

Sulaiman, Polisi Hutan BTNAP, Banyuwangi, 09-08-2017.

Arief K., Petugas SPTN Wilayah 1 Resort Grajagan, Banyuwangi, 10-08-2017.

Nur Afandi, Ketua BUMDES, Banyuwangi 22-11-2017.

Semiran, Sekretaris Desa Sumberasri, Banyuwangi, 22-11-2017.

Bu Siti, Pemilik Warung, Banyuwangi, 22-11-2017.

Su'ud, Nelayan, 22-11-2017.

Giman, Nelayan, 22-11-2017.

Drs. Suyatno, Mantan Kepala Desa Sumberasri, Banyuwangi, 14-10-2018.

LAMPIRAN A

Surat Lembaga Penelitian Universitas Jember



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. (031) 337818, 339385 Fax. 0311-337818
e-Mail : penelitian@unsi.jember.ac.id

Nomor : 0992 /UN25.3.1/LL/2017 11 Juli 2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Balai Taman Nasional Alas Purwo
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat Pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember Nomor : 3441/UN25.1.6/LL/2017 tanggal 7 Juli 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Bagus Bayu Prayogi / 120110301038
Fakultas / Jurusan : Ilmu Budaya / Sejarah
Alamat : Perum Sumber Alam Blok A / 9 Jember / No. Hp. 083847836258
Judul Penelitian : Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002 – 2012
Lokasi Penelitian : Balai Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : Enam Bulan (11 Juli 2017 – 11 Januari 2018)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris II,

Dr. Susanto, M.Pd
NIP 196306161988021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Fak. Ilmu Budaya Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO. QMS/173

LAMPIRAN B

Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

Jalan Brawijaya No. 20 Banyuwangi - Jawa Timur 68417
Telp. (0333) 410857 Telp/Fax (0333) 428675. Email: btrnap@tnalaspurwo.org. Website: www.tnalaspurwo.org

SURAT IJIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

NOMOR : SIMK.46/T.38/1U-5/KSA.1.3/07/2017

- Yang di:
1. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember Nomor: 0992/UN25.3.1/LT.2017 tanggal 11 Juli 2017 perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
2. Proposal Skripsi tentang "Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2017"

Dengan ini memberikan izin masuk kawasan konservasi :

Kepada :	: Bagus Bayu Prayogi
Pertanggungjawaban :	: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember
Nabangsa :	: Indonesia
Untuk :	: Melakukan Penelitian berjudul "Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2017"
Di lokasi :	: Mangrove Bedul, Resort Grajagan SPTN Wilayah I Tegaldlimo
Waktu :	: 24 Juli - 24 Oktober 2017

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor dan melakukan presentasi teknis kegiatan terlebih dahulu kepada Kepala SPTN Wilayah I Tegaldlimo di Pasaranyar.
 2. Membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Kegiatan Penelitian dikenakan pungutan **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.
 4. Membayar pungutan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor PP 12 tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pungutan Masuk Umum Rp. 5.000,-/orang/hari (Senin - Sabtu)
 - b. Pungutan Masuk Umum Libur Rp 7.500,-/ orang/hari (Minggu)
 5. Mematuhi tata tertib yang berlaku dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, antara lain:
 - a. Tidak akan mengubah, menambah atau mengurangi keindahan alam setempat
 - b. Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi kegiatan
 - c. Tidak melakukan pengambilan bagian-bagian tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi
 6. Tidak akan keluar dari sasaran/obyek kegiatan yang telah ditentukan.
 7. Meminta izin atas penggunaan atau peminjaman sarana prasarana milik negara kepada penerbit Simaksi.
 8. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI ini.
 9. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini, antara lain meliputi luka ringan, luka berat, cacat dan meninggal dunia.
 10. Terhadap mahasiswa Penelitian dan atau PKL diwajibkan untuk presentasi dihadapan staf Balai TN Alas Purwo setelah melaksanakan Penelitian/PKL dan untuk waktunya agar dikoordinasikan dengan Pimpinan Balai TN Alas Purwo
 11. Menyerahkan 2 (dua) buah laporan dan 1 (satu) keping CD ke Balai Taman Nasional Alas Purwo paling lambat 1 (satu) bulan setelah melaksanakan tugas.
 12. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.
- Demiikian surat izin masuk kawasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang SIMAKSI :



Bagus Bayu Prayogi
 NIM. 120110301038

Dikeluarkan : Di Banyuwangi
Tanggal : 24 Juli 2017
Pjh. Kepala Balai,


Muhammad Wahyudi, S.Hut.
 NIP. 19751201 200312 1 005

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Jakarta.
2. Direktur Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Jakarta.
3. Bupati Banyuwangi, Banyuwangi.
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, Jember
5. Muspika Tegaldlimo, Tegaldlimo.
6. Kepala SPTN Wilayah I Tegaldlimo, Tegaldlimo.

LAMPIRAN C

MoU Desa Sumberasri dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo



DEPARTEMEN KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
 Jl. Brzwijaya No. 20 Telp. (0333) 410857, 428675, Fax. 428675 Banyuwangi - 68417
 Website : www.alaspurwonationalpart.com
 Email : alaspurwo@telkom.net; plengkung@alaspurwonationalpart.com
JAWA TIMUR

Nomor : S 320/TV-T.18/Kons/2007
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Perjanjian Kerjasama

20 April 2007

Kepada Yth.
 Direktur Konservasi Kawasan Ditjen PHKA

Jakarta

Berkaitan dengan surat Kepala Desa Sumberasri Nomor : 12/429.513.02/2007 tanggal 31 Januari 2007 perihal Pengajuan Perjanjian Kerjasama, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Desa Sumberasri merupakan salah satu desa penyangga Taman Nasional Alas Purwo yang saat ini ditunjuk sebagai Model Desa Konservasi;
2. Sebagai salah satu program kegiatan di Model Desa Konservasi adalah pengembangan wisata alam terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo yang secara administrasi berada di Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi;
3. Berdasarkan permohonan perjanjian kerjasama oleh Kepala Desa Sumberasri telah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan Desa Sumberasri tentang pengembangan wisata alam terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo;
4. Sehubungan dengan telah ditandatanganinya naskah kerjasama tersebut, berikut kami sampaikan naskah kerjasama antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Desa Sumberasri dimaksud (terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatian ya diucapkan terima kasih.



Ir. M. Z. Hudiwano
 NIP 0800011177

Tersambung:

1. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional U Tegaldlimo
2. Kepala Desa Sumberasri

“jaga kelestarian hutan merupakan tugas kita bersama”

**PERJANJIAN PENGELOLAAN KOLABORASI
ANFAK
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
DENGAN
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KAB. BANYUWANGI**

**TENTANG
PENGEMBANGAN WISATA ALAM TERBATAS DI BLOK BEDUL
TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tujuh, bertempat di Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, Jl. Brawijaya Nomor 20 Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. M.Z. HUDIYONO
Jabatan : Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
Alamat : Jl. Brawijaya No. 20 Banyuwangi, Jawa Timur

Bertindak untuk dan atas nama Balai Taman Nasional Alas Purwo, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. SUYATNO
Jabatan : Kepala Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kab. Banyuwangi
Alamat : Jl Raya Sumberasri No. 18 Sumberasri Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi

Bertindak untuk dan atas nama Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi selanjut disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian pengelolaan kolaborasi ini selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Menimbang

- a. Bahwa Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan konservasi yang mempunyai fungsi pokok diantaranya sebagai pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya,
- b. Bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dalam pelaksanaannya adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat,
- c. Bahwa Taman Nasional Alas Purwo dalam pengelolaannya di bawah Balai Taman Nasional Alas Purwo,
- d. Bahwa Desa Sumberasri adalah instansi pemerintah daerah yang berada di sekitar Taman Nasional Alas Purwo (Desa Penyangga).
- e. Bahwa Desa Sumberasri merupakan salah satu model desa konservasi (MDK) Balai Taman Nasional Alas Purwo yang akan mengembangkan wisata alam terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo,
- f. Bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e diatas maka perlu dilakukan pengelolaan secara kolaborasi antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan Pemerintah Desa Sumberasri dalam rangka Pengembangan Wisata Alam Terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo



Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6186/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan kolaborasi bidang Pengembangan Wisata Alam Terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pengelolaan kolaborasi adalah membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan kelestarian Taman Nasional Alas Purwo melalui peran serta para pihak dalam berbagai kegiatan pengamanan, pelestarian dan pemanfaatan secara bersama-sama sehingga Taman Nasional Alas Purwo tersebut berfungsi optimal dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
2. Tujuan pengelolaan kolaborasi adalah :
 - c. Optimalnya pemanfaatan Taman Nasional Alas Purwo dari sektor wisata alam;
 - d. Terwujudnya peningkatan peran serta para pihak khususnya masyarakat Desa Sumberasri;
 - e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Sumberasri dan sekitarnya;
 - f. Terwujudnya komitmen bersama dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan kolaborasi ini adalah pengembangan wisata alam terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo secara bersama-sama antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan Pemerintah Desa Sumberasri.

Pasal 3

ARAHAN PROGRAM

Ruang lingkup kegiatan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam bentuk arahan program yang dituangkan dalam Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama pengelolaan kolaborasi ini.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan lokasi untuk pengembangan wisata alam terbatas dan sarana pendukungnya seluas 4 Hekta;
- b. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan pengelolaan wisata alam terbatas di Blok Bedul
- c. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan pengamanan dan pemeliharaan areal kerjasama
- d. Bersama-sama PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pembinaan habitat disekitar areal kerjasama
- e. Membuat Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) bersama-sama PIHAK KEDUA
- f. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi
- g. Bersama-sama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo
- h. Menginformasikan pada PIHAK KEDUA apabila melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini
- i. Menyusun laporan bersama PIHAK KEDUA dan menyampaikannya kepada Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- j. Membantu, membina dan mengarahkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan wisata alam terbatas.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. Membangun sarana dan prasarana wisata alam terbatas pada lokasi yang telah ditetapkan setelah mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA
- b. Memelihara sarana dan prasarana wisata alam terbatas sebagaimana tercantum pada butir a.
- c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan pengelolaan wisata alam terbatas di Blok Bedul
- d. Membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan pengamanan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Alas Purwo
- e. Membantu PIHAK PERTAMA dalam rangka pembinaan habitat
- f. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Alas Purwo
- g. Membuat Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Karya Tahunan (RKT) bersama-sama PIHAK PERTAMA
- h. Mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA apabila melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini
- i. Menyusun laporan bersama PIHAK PERTAMA dan menyampaikannya kepada Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 5

HAK-HAK PARA PIHAK

HAK-HAK PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata alam terbatas beserta pemanfaatannya oleh PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan kolaborasi ini

HAK-HAK PIHAK KEDUA

- a. Dapat ikut memanfaatkan lokasi yang telah ditetapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata alam terbatas.
- b. Mendapatkan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA dalam pengembangan wisata alam di Blok Bedul;
- c. Mendapatkan manfaat dan atau hasil kegiatan pengelolaan kolaborasi dari keuntungan pengelolaan sarana dan prasarana berdasarkan peraturan yang ada

h
3/1

- d. dalam rangka peningkatan pendapatan sesuai butir c, PIHAK KEDUA berhak membuat Peraturan Desa dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PENGELOLAAN KOLABORASI

Perjanjian pengelolaan kolaborasi ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai sejak 2016, dilanjutkan dan dapat diperpanjang selama PARA PIHAK menenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengelolaan kolaborasi ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan sebagai akibat dari perjanjian kolaborasi ini menjadi beban PARA PIHAK, yang dituangkan dalam RKL dan RKT yang disusun dan disepakati bersama.
2. Sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 8

PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Laporan

- a. Laporan tahunan atau insidental disusun oleh PARA PIHAK dan disampaikan kepada Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- b. Laporan sebagaimana butir a di atas berisi perkembangan pelaksanaan perjanjian kolaborasi termasuk permasalahan yang dihadapi.
- c. Laporan akhir disusun oleh PARA PIHAK setelah masa perjanjian kolaborasi berakhir dan diserahkan kepada Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- b. Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali dan menjelang berakhirnya masa perjanjian pengelolaan kolaborasi.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b disampaikan kepada PARA PIHAK.

Pasal 9

PERUBAHAN, PEMUTAHAN DAN PERPANGGILAN

1. Perubahan atas perjanjian pengelolaan kolaborasi ini dilakukan berdasarkan persetujuan secara timbal-balik para pihak.
2. Perubahan sebagaimana butir 1 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal perjanjian pengelolaan kolaborasi ini.
3. Perjanjian pengelolaan kolaborasi ini dapat dibatalkan:
 - a. Atas persetujuan para pihak sebelum jangka waktu perjanjian pengelolaan kolaborasi berakhir;
 - b. Apabila PARA PIHAK tidak melakukan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 - c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahunan terakumulasi PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pengelolaan kolaborasi ini, maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

4. Perubahan, pembatalan, dan/atau perpanjangan atas perjanjian pengelolaan kolaborasi ini dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian pengelolaan kolaborasi ini.

Pasal 10

STATUS SARANA DAN PRASARANA SERTA PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN KOLABORASI

1. Sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka program pengelolaan kolaborasi ini, setelah program berakhir diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan hanya digunakan untuk kegiatan serta kepentingan konservasi.
2. Setiap publikasi dalam rangka pengelolaan kolaborasi harus dikoordinasikan sebelumnya kepada PARA PIHAK dan mencantumkan logo PARA PIHAK.

Pasal 11

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Direktur Konservasi Kawasan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam minimal 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para pihak sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.

Pasal 13

FORCE MAJEURE (KAHAR)

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan kahar, yang berakibat merugikan PARA PIHAK, maka pihak yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya kahar untuk menegakkan pertanggungjawaban.
2. Yang termasuk kahar antara lain bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, banjir, dan segala peristiwa diluar kuasa PARA PIHAK sehingga tidak mampu melakukan kesibukannya.
3. Bila terjadi kahar maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali hal dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Keadaan kahar yang mungkin mengakibatkan hambatan atas pelaksanaan bagian atau seluruh perjanjian ini, tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian ini.

Handwritten signature

Pasal 14
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah perjanjian pengelolaan kolaborasi ini akan ditetapkan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat, serta disetujui oleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
2. Naskah perjanjian pengelolaan kolaborasi ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermetarai cukup dan masing-masing berlaku sebagai asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
SUYATNO
Kepala Desa

Banyuwangi, 31 Januari 2007

PIHAK PERTAMA

Ir. M.Z. HUDIYONO
NIP 08006317 /

Mengetahui / Menyetujui :

DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN
DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM



Ir. LANGGAR YULIANTO LABAN, M.M
NIP 080052881

LAMPIRAN D**Surat Keputusan Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok
Bedul Taman Nasional Alas Purwo**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO
KANTOR KEPALA DESA SUMBERASRI
Jalan Raya Sumberasri.No.18 Telp. (0333) 592312**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI
NOMOR : 188 / 05 / 2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL
TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO**

- Membaca** : Berita Acara Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul TN Alas Purwo Desa Sumberasri, tanggal 29 Oktober 2008 Nomor: 188/43/429.513.02 /2008
- Menimbang** : a. Perjanjian Kerjasama Kalaborasi Pemerintah Desa Sumberasri dengan Balai taman Nasioanal Alas Purwo dalam pegelolaan wisata alam terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo tanggal 31 Januari 2007
b. Guna mewujudkan perjanjian di atas makadi bentuk Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul TN Alas Purwo Desa Sumberasri, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Kedua :
Ketiga :
Keempat :
- : Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi , seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
 - : Memberikan tugas dengan sepenuhnya kepada Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul TN Alas Purwo Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo sesuai dengan petunjuk yang ada.
 - : Segala biaya operasional kegiatan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul TN Alas Purwo berasal dari dana APBDes dan Dari Hasil Pengelolaan Ekowisata, Pihak lain yang sah dan tidak mengikat, serta Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
 - : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di : SUMBERASRI
Tanggal : 29 OKTOBER 2008



LAMPIRAN E

**Berita Acara Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok
Bedul Taman Nasional Alas Purwo**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO
KANTOR KEPALA DESA SUMBERASRI
Jalan Raya Sumberasri.No.18 Telp. (0333) 592312

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL**
Nomor : 188/43/429.513.02 /2008

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Oktober Dua Ribu Delapan bertempat di Balai Desa Sumberasri telah diadakan musyawarah warga yang dihadiri oleh wakil Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Perwakilan petugas TN. Alas Purwo, JICA, BPHM Wilayah I, Tokoh Masyarakat dan anggota Masyarakat dalam rangka Pembentukan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul TN Alas Purwo Desa Sumberasri.

Dalam Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan, sebagai berikut

1. Terbentuknya Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul.
2. Terbentuknya Susunan BP. Ekowisata Mangrove Blok Bedul sbb.

Pelindung/Penasehat	: Kepala Balai TN. Alas Purwo
Pembina	: Drs. Suyatno
Ketua	: Eko Kurniawan
Sekretaris	: Rahman Sugiarto
Bendahara	: Muh. Solihin
Bidang Sarpras	: Imam Suyono
Bidang Humas	: Sutarno
Bidang Guide	: Fitriyah Agustina, S.TP.
Bidang Keamanan	: Mesri

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagaimana mestinya

Sumberasri, 29 Oktober 2008

KEPALA DESA SUMBERASRI



Drs. SUYATNO

Wakil Musyawarah

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Rusmiyati | : Tokoh Masyarakat |
| 2. Iksanudin | : Tokoh Pemuda |
| 3. Nur Afandi | : Tokoh Agama |
| 4. Nurhadi Siswanto | : Unsur LPMD |

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Sumberasri

Nomor :

Tanggal : 29 Oktober 2008

**SUSUNAN BADAN PENGELOLA EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL
TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO**

Pelindung/Penasehat : Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo

Pembina : Drs. Suyatno

Ketua : Eko Kurniawan

Sekretaris : Rahman Sugiarto

Bendahara : Muh. Solihin

Humas : Sutarno

Sarpras : Imam Suyono

Bidang Guide : Fitriyah Agustina, S.TP.

Bidang Keamanan : Meseri



LAMPIRAN F

Koran Radar Banyuwangi

Petugas Ringkus Gembong Pencuri Kayu Alas Purwo

TEGALDLIMO- Tim Gabungan Polsek Tegaldlimo dan perlindungan konservasi alam (PKA), kemarin berhasil menangkap Muklas, warga Desa Tembokojo, Kecamatan Muncar, yang dikenal sebagai salah satu gembong pencari kayu kepo dan kelas bayur di daerah kawasan PKA Alas Purwo.

Menurut kepala sub seksi konservasi Muncar Muhamad Slamet, Muklas selama ini sudah masuk DPO (daftar pencarian) PKA. Namun, selama ini Muklas selalu berhasil lolos dari jebakan petugas.

Saat penangkapan Muklas, kata Slamet, sempat terjadi perlawanan anam petugas dengan Muklas. Sebab, Muklas melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh petugas.

"Pada awalnya kita diterima oleh Muklas di rumahnya dengan baik, namun tiba-tiba Muklas pamit sebentar ingin beli rokok. Ternyata kesengatan itu justru ia gunakan melarikan diri," katanya.

Ditambahkan oleh Slamet, pihaknya sempat kehilangan jejak. Namun, berkat bantuan masyarakat akhirnya Muklas yang sedang bersembunyi dapat ditangkap. "Nah waktu akan ditangkap itulah, Muklas melakukan perlawanan. Sehingga sempat terjadi baku hantam dengan petugas," katanya.

Menurut Slamet, nama Muklas sudah tidak asing dalam persoalan pencurian kayu. Sebab, ia sering sering berturusan dengan petugas dalam kasus yang sama. Sebenarnya, tambah dia, pihaknya sering memergoki aksi pencurian yang dilakukan oleh Muklas. Namun, selama ini Muklas selalu berhasil kabur.

Saat menjalankan aksinya, tambah Slamet, Muklas selalu membawa barang curiannya lewat laut. Dia menggunakan kapal kecil untuk membawa kayu curiannya itu.

Selang kayu-kayu curian itu, katanya, dibaga dijual di daerah sekitar Muncar. Pasalnya, kayu itu sangat cocok untuk dibuat kapal atau perahu. Untuk menjalani prosesitas lebih lanjut, tambah Slamet, Muklas kini diarahkan ke Polsek Tegaldlimo.

Kapolsek Tegaldlimo Prita Pri Kuswadi saat dikonfirmasi Radar Banyuwangi sedang rapat di Pylres. Namun, anggotanya membenarkan penangkapan terhadap Muklas tersebut.(ah)

Radar Banyuwangi, Jumat, 18 Februari 2000.

Parah, Tingkat Kerusakan Hutan Banyuwangi

BANYUWANGI-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pecari merasa prihatin terhadap kondisi lingkungan hidup di Banyuwangi. Perusakan hutan dan biota laut di Kota Gandrung Banyuwangi dinilai sudah sangat parah. Karena itu, memperingati Hari Bumi LSM Pecari mengajak masyarakat untuk menyayangi bumi.

Aktivis Pecari Yudhi Prasetyo mengatakan, perusakan hutan dan laut di Banyuwangi saat ini dilakukan tanpa tedeng aling-aling. Para perusak mengesampingkan budaya malu dan patuh pada hukum. Kerusakan hutan di kawasan Banyuwangi Selatan saja, kata dia, telah mencapai 2.300 hektare. Belum kerusakan di kawasan hutan Banyuwangi Barat dan Utara. "Para perusak telah menghancurkan hutan dan laut termasuk isinya. Semata-mata hanya untuk memenuhi ambisi pribadi tanpa pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi orang lain," tuding pemuda berambut gondrong itu.

Ditambahkan oleh Yudhi, laut dan biota Banyuwangi kini sudah tidak karuan kondisinya. Pesisir Banyuwangi kini rusak parah. Padahal, dia memberi contoh, terumbu karang membutuhkan waktu 25 tahun lebih untuk tumbuh kembali. "Namun, tanpa kompromi terumbu itu malah dibom habis-habisan. Para nelayan juga banyak yang nakal. Mereka mencari ikan dengan menggunakan potasium dan dinamit," sesalnya.

Padahal, semua itu telah diatur dalam Undang-Undang No 4/1982, tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Ditambahkan, UU itu lahir sebagai reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang kian meningkat intensitasnya.

Bahkan, UU tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 29/1986 yang mengatur tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Malah peraturan itu didukung oleh *national environmental policy act* (NEPA) yang didirikan pada 1969. "Kejahatan manusia terhadap lingkungan dikategorikan sebagai *White Collar Crime*. Kriminalitas jenis ini wajib ditindak tegas tanpa kompromi," tegasnya.

Lebih lanjut Yudhi menegaskan, bumi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia merupakan kekayaan yang akan diwariskan kepada anak cucu. Sehingga, imbaunya, jangan sampai dikotori dan dirusak isinya.

"Karena itu, pada hari bumi ini, marilah kita hentikan perilaku mengotori dan merusak bumi. Agar tempat kita hidup ini bisa ditempati oleh anak cucu dengan nyaman," ajaknya lantang. (ir)

Mengenal Bacabup Kita

PENJARINGAN bakal calon bupati (bacabup) Banyuwangi periode 2000-2005 sebentar lagi dimulai. Salah satu syarat bacabup, menurut DPRD, calon harus dikenal oleh masyarakat. Menindaklanjuti hal itu, Radar Banyuwangi akan membuka rubrik khusus bernama "Mengenal Bacabup Kita" yang memuat jati diri, visi dan misi bacabup ketika memimpin Banyuwangi lima tahun ke depan. Bagi bacabup atau tim suksesnya yang ingin memanfaatkan rubrik tersebut, silakan secepatnya menghubungi redaksi Radar Banyuwangi Jalan Yos Sudarso 89-C atau telepon 412224. **Redaksi.**

Radar Banyuwangi, Minggu, 20 Februari 2000.

Koran Radar Banyuwangi

RADAR BANYUWANGI

Halaman 3

Jagalah Hutan Dari Kepunahan

Suatu Saat Air Laut Masuk Rumah

TEGALDILIMO - Wabup Banyuwangi Drs Supardjimin mengungkapkan agar masyarakat sebagai kelestarian hutan dari kepunahannya, karena fungsi hutan sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia.

Mengutip pernyataan para pakar, Supardjimin mengungkapkan, suatu saat suatu air laut akan naik ke daratan, hal ini tentunya, jika hutannya habis maka air itu juga akan sampai ke dalam pemukiman warga.

Peringatan ini disampaikan saat meresmikan Desa Kaliputih dan Desa Purwasajung sebagai desa persiapan di Kecamatan Tegaldilimo kemarin. — Dua desa yang diresmikan itu, merupakan pe-

cahan Desa Kandungan. — "Desa Persiapan Kaliputih merupakan desa penyanggah hutan, hal ini karena wilayah Desa Kaliputih memang dipinggir hutan purwasajung yang juga merupakan daerah pinggir laut," tandasnya.

"Sebab kotanya, jika hutannya baik, maka air yang naik itu akan dapat ditahan oleh hutan yang ada, sehingga air laut tidak sampai ke pemukiman masyarakat." "Jah kita harus selalu waspada terhadap masalah ini, sehingga pelestarian hutan sangat penting sekali," lanjutnya.

Ditawi lain Supardjimin menjelaskan maksud diadakan pemecahan desa sebagai upaya pemerintah untuk dapat lebih optimal bagi dalam melayani kepentingan masyarakat.

Pada kesempatan peresmian ini, juga ditetapkan pejabat kepala desa persiapan, termasuk Drs Susanto sebagai kepala Desa Persiapan Purwasajung, dan Misyadi sebagai kepala Desa Kaliputih.

Radar Banyuwangi, Jumat, 25 Februari 2000.

Letda Pol Rahmat Kurniawan:

Petugas tidak akan mentolerir siapa saja yang melakukan penjarahan hutan. Siapa pun yang tertangkap, tetap akan kita proses.



"Petugas Tidak Akan Mentolerir Penjarah Hutan"

PURWOHARJO, Agus Budiarto, warga Desa/Kecamatan Tegaldilimo, kemarin berhasil dibekuk petugas Polsek Purwoharjo saat mencuri kayu jati. Peronda 21 tahun itu dibekuk beserta barang buktinya di wilayah hutan Karutan, Kecamatan Purwoharjo.

Menurut pengakuan Agus, dia melakukan pencarian kayu itu bersama dengan empat orang temannya. Namun, saat petugas datang empat orang lainnya itu berhasil kabur. Akhirnya, petugas hanya berhasil menangkap Agus.

Ditambahkannya, dia hanya ikut-ikutan mencari kayu. Saat itu dia baru kembali dari sawah dan langsung diajak oleh teman-temannya mencuri kayu jati. "Sungguh Mas, saya hanya sekali ini melakukan pencurian, insipin karena diajak," katanya.

Agus memaparkati, dia hanya membantu temannya membawa kayu-kayu curian itu. "Saya hanya mendorong sepeda teman-teman yang sedang mengangkat kayu," akunya polos.

Ditanya Radar Banyuwangi rencananya untuk apa kayu-kayu curian itu? Agus tidak segera menjawab. Namun, beberapa saat kemudian akhirnya dia buka mulut. Dengan nada lirih dia mengatakan, bahwa kayu-kayu itu akan digunakan untuk membuat tempat tidur.

Kapolsek Purwoharjo Letda Pol Rahmat Kurniawan saat dikonfirmasi Radar Banyuwangi membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dikatakan, petugas akan terus mengembangkan kasus pencarian ini.

Rahmat yang baru seminggu menjabat Kapolsek Purwoharjo mengungkapkan, pihaknya tidak akan mentolerir siapa saja yang melakukan penjarahan hutan. "Siapa pun yang tertangkap, tetap akan kita proses," tandas perwira muda yang pernah bertugas di Timor Timur itu.

Radar Banyuwangi, Sabtu, 26 Februari 2000.

Koran Radar Banyuwangi

Polisi Sita 15 Gelondong Mahoni

MUNCAR Sementara itu, jajaran Polsek Muncar dan Perhutani, kemarin mengamankan mobil yang sedang mengangkut 15 gelondong kayu mahoni ukuran besar. Ditengarai Truk L. 1612 EJ itu mengangkut kayu hasil curian.

Selain menyita kayu beserta truknya, polisi juga menahan sopir truk Ahmad Saini, warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, dan Abdurrahman, warga Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, yang mencarter truk Saini untuk keperluan mengangkut kayu curian.

Kepada Radar Banyuwangi Ahmad Saini mengatakan, kayu-kayu itu rencananya akan dikirim ke Bangorejo, kepada siapa kayu itu akan dikirim dan siapa pemilik kayu itu ia mengaku tidak tahu.

Sebab, kata Saini, ia hanya diminta Abdurrahman untuk mengantar dengan imbalan Rp 30 ribu untuk sekali angkut. "Saya dicarter oleh Abdurrahman itu untuk mengantar kayu ke Bangorejo, mungkin kayu-kayu itu juga miliknya Abdurrahman," katanya.

Sebenarnya, cerita Saini, dia menolak membawa kayu-kayu itu. Pasalnya, kayu-kayu itu tidak dilengkapi surat-surat. Akan tetapi oleh Abdurrahman ia diberitahu, kalau membawa kayu mahoni meski tidak ada suratnya tidak apa-apa, karena yang menggunakan surat itu hanya kayu jati. "Saya itu tidak tahu masalah kayu seperti ini, katanya tidak usah tjin tidak apa-apa saya mau saja mengangkutnya," ujarnya.

Menurut petugas Perhutani yang ditemui di mapolsek Muncar, kayu-kayu itu sebenarnya milik Jauhari, warga Desa Kedungrejo. Sedang Abdurrahman hanya disuruh untuk mencari pembeli dan menjualkannya.

Kayu-kayu mahoni itu, kata petugas Perhutani, diduga hasil curian dari hutan Sembulungan. Jadi mereka menebang di Sembulungan, kemudian melalui laut kayu-kayu itu diseret dengan kapal ke darat," tuturnya.

Kapolsek Muncar lettu Pol Sudarsono, saat dikonfirmasi Radar Banyuwangi membenarkan penangkapan itu. Kini, pihaknya menahan Ahmad Saini dan Abdurrahman beserta truk berisi 15 kayu mahoni yang masih berbentuk gelondongan. (abi)

Radar Banyuwangi, Sabtu, 11 Maret 2000.

Pencuri Kayu Dibekuk Perhutani

TEGALDLIMO-Tiga kawan-an spesialis pencuri kayu jati, yakni Gimo, 30, Fatoni, 24, dan Sahudi, 28, ketiganya warga Dusun Kutorejo, Desa Kalipahit, Kecamatan Tegaldlimo, dibekuk tim gabungan Perhutani, Banyuwangi Selatan, kemarin. Ketiganya kini mendekam dibalik jeruji Mapolsek, sedang barang bukti berupa lima gelondong kayu, pecok, gergaji, dan Gerobak bermesin diesel, juga diamankan sebagai barang bukti.

Menurut informasi RaBa, tertangkapnya tiga pelaku itu, bermula saat tim gabungan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, sedang melakukan patroli ke tengah hutan Purwo yang dikenal sangat angker itu. Saat itu tim berpapasan dengan gerandong (Gerobak bermesin diesel) yang mengangkut kayu bakar. "Semula kami tidak menyangka kalau grandong itu juga membawa kayu," kata karyawan Perhutani.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat itu juga ketiga pelaku berikut barang buktinya, diserahkan ke Polsek Tegaldlimo, untuk diproses sesuai hukum. Kapolres Banyuwangi, AKBP Drs Anton Setiadi SH, melalui Kapolsek Tegaldlimo, Ipda M Ibnu Mas'ud SH, mengakui ketiga tersangka itu kini sedang diperiksanya secara intensif. (abi)

Radar Banyuwangi, Rabu, 13 Juni 2001.

LAMPIRAN G

Dokumentasi Foto

Kondisi Bedul sebelum di kelola



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2006.

Rumah-rumah Masyarakat Nelayan di Kawasan Bedul



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2006.

Dermaga Tanah



Sumber: Koleksi Foto Eko Kurniawan Tahun 2006.

Dermaga Beton



Sumber: Koleksi Foto Eko Kurniawan 2010.

Pembangunan Dermaga



Sumber : Koleksi Foto Eko Kurniawan Tahun 2008.

Kedatangan JICA ke Desa Sumberasri



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2007.

Peresmian Ekowisata Mangrove Blok Bedul



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2010.

Pintu Masuk Ekowisata Mangrove Blok Bedul



Sumber : Koleksi Foto Eko Kurniawan Tahun 2009.

Papan Informasi



Sumber : Koleksi Foto Pribadi Tahun 2017.

Warung dan Gazebo



Sumber : Koleksi Foto Eko Kurniawan Tahun 2010.

Jembatan Kayu Menuju Dermaga



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2010.

Perahu Gondang-gandung Tempo Dulu



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2006.

Pencari Kayu dan Kremis Menyebrangi Segara Anakan menggunakan Perahu Gondang-gandung



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2006.

Wisatawan Memadati Ekowisata Mangrove Bedul



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2009.

Penanaman Mangrove oleh Mahasiswa Internasional dari 30 Negara



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2009.

Penanaman 1000 Mangrove oleh Pelajar, Relawan dan Wisatawan



Sumber : Koleksi Foto Bapak Suyatno Tahun 2010.

LAMPIRAN H**Surat Keterangan Wawancara**

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Kurniawan S.Pd

Pekerjaan : Guru di SMP Muhammadiyah, Mantan Ketua BPEMBB
Tahun 2008

Alamat : Desa Sumberasri, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi

Umur : 35 Tahun

Menerangkan bahwa saudara:

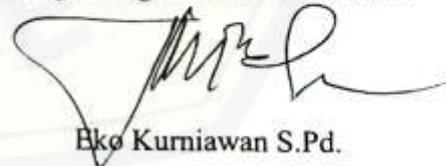
Nama : Bagus Bayu Prayogi

Alamat : Rogojampi, Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 10 November 2015



Eko Kurniawan S.Pd.

Hasil Wawancara

Pengembangan Ekowisata Mangrove Bedul digagas oleh Pemerintah Desa Sumberasri dengan harapan menghentikan pencurian kayu, yang pada tahun 2002 masih sering terjadi. Masyarakat yang berada di Dusun Blok Solo yang berbatasan langsung dengan taman nasional dan Perhutani sering keluar masuk hutan untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, seperti mencari reneck.

Desa Sumberasri menjadi Model Desa Konservasi pada tahun 2006 atas inisiatif dan langkahnya dalam menggagas pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata. Kerjasama Desa Sumberasri dengan BTNAP terjalin melalui MoU dengan master program pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata terbatas. Terbatas dalam artian memiliki batasan-batasan dalam kegiatan pariwisatanya sebagai upaya pelestarian dan perlindungan kawasan Bedul yang merupakan kawasan pelestarian TNAP. Ekowisata Mangrove Blok Bedul dikelola sepenuhnya oleh desa melalui BUMDES yang merupakan lembaga resmi pemerintah dan diawasi langsung oleh BTNAP. Pemberdayaan masyarakat sekitar Bedul dilakukan untuk mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Peran masyarakat dalam pengelolaan menjadi penting untuk menggerakkan roda perekonomian desa.

Surat Keterangan Wawancara

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Suyatno

Pekerjaan : Anggota DPR, Mantan Kepala Desa Sumberasri

Alamat : Desa Sumberasri, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi

Umur : 46 Tahun

Menerangkan bahwa saudara:

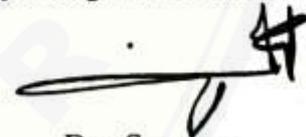
Nama : Bagus Bayu Prayogi

Alamat : Rogojampi, Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 14 Oktober 2018



Drs. Suyatno.

Hasil Wawancara

Ide awal pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata bertujuan untuk mengangkat nama desa melalui potensi sumber daya alam kawasan Bedul. Tujuan lainnya untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat yang bergantung pada hasil hutan yang sifatnya merusak, menjadi tidak merusak dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan pariwisata. Awal mulanya Pemerintah Desa Sumberasri inisiatif untuk membuka akses jalan melewati kawasan Perhutani. Kawasan hutan yang dibuat jalan sejak awal memang sudah tidak ada pohonnya, jadi masyarakat hanya membat semak melewati kawasan hutan Perhutani. Pada tahun 2002 jalan tembus, namun hanya dapat dilalui kendaraan roda dua karena masih berupa jalan tanah. Pelebaran jalan baru dilakukan pada tahun 2005 setelah Pihak Perhutani serta taman nasional bertemu dengan Pemerintah Desa Sumberasri, jalan diperlebar sampai menuju Bedul. Kondisi jalan juga diperbaiki dengan batu-batuan makadam. Keseriusan Pemerintah Desa Sumberasri ingin menjadikan Bedul sebagai objek wisata diapresiasi oleh BTNAP.

Pada tahun 2006 Desa Sumberasri ditunjuk oleh TNAP menjadi Model Desa Konservasi bersama Desa Kalipait dalam Sarasehan bersama Pemda Banyuwangi. Tahun 2007 Desa Sumberasri bersama TNAP menjalin kerjasama untuk mengelola kawasan Bedul menjadi objek wisata terbatas. Akhir tahun 2007 JICA datang ke Bedul untuk observasi ekosistem mangrove di Segara Anakan. JICA dalam kedatangannya mendukung pengelolaan kawasan hutan Mangrove Bedul menjadi ekowisata. Konsep wisata yang berwawasan lingkungan. Pada 2008 kepengurusan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul terbentuk dibawah naungan BUMDES Loh Jinawe yang diawasi oleh Pemerintah Desa Sumberasri dan TNAP. Tahun 2009 setelah berkonsultasi dengan TNAP, Ekowisata Mangrove Blok Bedul dibuka untuk umum meskipun kondisi kawasan belum tertata rapi. Ekowisata Mangrove Blok Bedul mendapat penghargaan di ajang Festival Wisata Nusantara se-Jawa Timur dengan kategori pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Tahun 2010 Ekowisata Mangrove Blok Bedul dibuka secara resmi oleh Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari.

Surat Keterangan Wawancara

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukadiyanto

Pekerjaan : Kepala Desa Sumberasri

Alamat : Desa Sumberasri, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi

Umur : 49 Tahun

Menerangkan bahwa saudara:

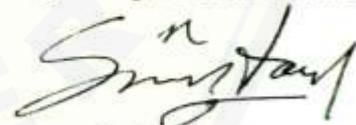
Nama : Bagus Bayu Prayogi

Alamat : Rogojampi, Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 6 Oktober 2016



Sukadiyanto

Hasil Wawancara

Ekowisata Mangrove Blok Bedul dibangun dan dibuka secara resmi pada tahun 2010. Pengelolaannya oleh BPEMBB yang diawasi oleh desa melalui BUMDES Loh Jinawe serta TNAP. Ekowisata Bedul ditujukan untuk mengalihkan mata pencaharian masyarakat yang dulunya menggantungkan hidup pada hasil hutan. Kehidupan perekonomian masyarakat Desa Sumberasri bergantung pada hasil pertanian. Sebagian besar masyarakat hidup sebagai petani baik yang memiliki sawah atau ladang sendiri, maupun yang buruh tani. Hasil pertanian utama masyarakat Desa Sumberasri antara lain padi, kedelai, jagung, sementara hasil pertanian buah antara lain jeruk dan buah naga.

Ekowisata mangrove Bedul memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Desa Sumberasri. Dampak yang paling terasa yakni terhadap perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang berkecimpung dalam pengelolaan ekowisata. Dulunya mereka sangat bergantung pada hutan, mengambil kayu serta reneck untuk dijual. Masyarakat yang diberdayakan untuk mengelola sebagian besar merupakan warga yang dahulu beraktifitas di hutan. Melalui penyuluhan serta pelatihan baik dari pemerintah desa maupun TNAP mereka mendapat pemahaman bahwa aktifitas yang selama ini dilakukan dapat mempengaruhi kelestarian kawasan hutan. Semenjak ide pengelolaan kawasan Bedul menjadi objek wisata, masyarakat dilibatkan dalam proses awal pembangunannya sampai diresmikan pada tahun 2010. Semenjak adanya ekowisata, masyarakat yang sebelumnya beraktifitas di hutan mulai berhenti dan membuka usaha lain diluar sumber daya hutan.

Surat Keterangan Wawancara

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afandi

Pekerjaan : Manager BUMDES Loh Jinawe Desa Sumberasri

Alamat : Desa Sumberasri, Kec. Purwoharjo, Banyuwangi

Umur : 42 Tahun

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Bagus Bayu Prayogi

Alamat : Rogojampi, Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 22 November 2017



Nur Afandi

Hasil Wawancara

Ekowisata Mangrove Blok Bedul mulai digagas sejak tahun 2000an. Bermula dari keresahan Pemerintah Desa Sumberasri karena ada sebagian warganya ada terlibat dalam pencurian kayu . Masyarakat yang bermukim di kawasan Bedul banyak yang memanfaatkan sumber daya hutan. Dalam prosesnya Pemerintah Desa Sumberasri nekat membuat jalan menuju Bedul, masih berupa jalan tanah menggantikan jalan setapak yang sering dilalui para nelayan. Potensi Bedul menarik perhatian Kepala Desa Sumberasri saat itu Pak Suyatno. Beliau ingin potensi Bedul dikembangkan dan dikelola.

Gagasan tersebut kemudian mulai dikomunikasikan pada perangkat desa dan tokoh masyarakat. Potensi Bedul dikelola untuk mengangkat nama desa sekaligus untuk mengalihkan kebiasaan masyarakat yang sifatnya merusak menjadi mengelola potensi sumber daya alam yang ada. Jadilah pada tahun 2006 Desa Sumberasri ditunjuk menjadi Model Desa Konservasi oleh TNAP. JICA datang pada tahun 2007 mencari lokasi binaan kawasan hutan mangrove. Pengelolaan wisata diarahkan pada wisata yang berwawasan lingkungan. Ekowisata dipilih jadi tujuan pengelolaan sebagai upaya mendukung konservasi di kawasan taman nasional. Pada 2009 Ekowisata Bedul mulai dibuka untuk umum sebelum pada akhirnya tahun 2010 baru diresmikan oleh Bupati Ratna Ani Lestari.

Surat Keterangan Wawancara

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman

Pekerjaan : Polisi Hutan TNAP, SPTN Wilayah 1 Tegaldlimo Resort
Grajagan

Alamat : Muncar, Banyuwangi

Umur : 57 Tahun

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Bagus Bayu Prayogi

Alamat : Rogojampi, Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 9 Agustus 2017



Sulaiman

Hasil Wawancara

Pengambilan sumber daya hutan oleh masyarakat sudah lama terjadi, bahkan sebelum krisis moneter tahun 1997. Masyarakat keluar masuk kawasan taman nasional dengan berbagai tujuan. Mencari kremis, mencari kayu, kegiatan spiritual, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Dalam kawasan resort Grajagan sendiri, kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan antara lain mencari kremis, menangkap ikan atau udang di Segara Anakan, serta pengambilan reneck.

Sebenarnya menurut hukum kehutanan, kawasan taman nasional tidak boleh ada aktifitas manusia yang dapat mengganggu kehidupan ekosistem kawasan. Namun dalam peraturan sistem zonasi yang baru, terdapat zona pemanfaatan tradisional yang dapat dimanfaatkan sumberdayanya. Kerusakan kawasan hutan mangrove di Segara Anakan terdapat di beberapa wilayah seperti Sungai Kere serta Blok Cungur yang merupakan kawasan yang berbatasan dengan wilayah pengelolaan perhutani. Dalam pengamatan petugas TN kawasan tersebut memang memiliki kualitas tanah yang tidak baik, serta perubahan iklim yang sering terjadi menyebabkan komunitas tanaman mangrove mengalami gagal tumbuh dan mati.

Surat Keterangan Wawancara

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Kurniawan

Pekerjaan : Petugas BTNAP

Alamat : Kelurahan Kebalenan, Banyuwangi

Umur : 33 Tahun

Menerangkan bahwa saudara:

Nama : Bagus Bayu Prayogi

Alamat : Rogojampi, Banyuwangi

Telah melakukan wawancara dan penelitian berkaitan dengan skripsi yang berjudul Konservasi Hutan Mangrove Melalui Ekowisata Mangrove Blok Bedul Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Banyuwangi Tahun 2002-2012.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 10 Agustus 2017



Arief

Hasil Wawancara

Pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul pada awalnya digagas oleh Pemerintah Desa Sumberasri karena ketergantungan yang besar masyarakat pada hasil hutan. Pemerintah Desa Sumberasri pada awalnya bergerak sendiri dalam pembukaan jalan serta observasi kawasan, mengingat wilayah tersebut secara administratif masuk dalam Desa Sumberasri. BTNAP kemudian mengetahui langkah Pemerintah Desa Sumberasri dalam mengelola potensi Segara Anakan. Desa Sumberasri kemudian ditunjuk sebagai Model Desa Konservasi pada tahun 2006 atas inisiatifnya amengelola potensi kawasan Bedul dan Segara Anakan.

Bedul mulai dibangun pada tahun 2006, ditata sedemikian rupa menjadi objek wisata terbatas. MoU kerjasama antara Desa Sumberasri dengan TNAP resmi terjalin pada tahun 2007. Program utamanya yakni mengelola kawasan Bedul menjadi objek wisata terbatas. Terbatas dalam artian kegiatan wisatanya dibatasi sebagai upaya perlindungan dan pelestarian kawasan taman nasional. Resmi dibuka pada tahun 2010, Ekowisata Mangrove Blok Bedul mulai dikenal wisatawan. Kunjungan wisata ke kawasan ini menarik perhatian banyak wisatawan untuk mengunjungi kawasan TNAP lebih luas lagi. Pengaruhnya terhadap kehidupan ekologi taman nasional antara lain berkurangnya aktifitas masyarakat yang merugikan seperti perburuan satwa serta pencurian kayu.